

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

Jln. Jalan Poros Ujoh Bilang - Long Melaham RT XV Kecamatan Long Bagun

Website: bpbdmahulu.id

bpbdmahakamulu@gmail.com

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Ujung Bilang, 28 Desember 2023

Kepala Pelaksana BPBD



Agus Darmawan, S.Pd., M.Si.
NIP. 19790816 200312 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

Capaian sasaran strategis 1 " Persentase Kampung Tangguh Bencana ":

- Diukur dengan indikator kinerja yaitu Persentase Kampung Tangguh Bencana "Persentase Kampung Tangguh Bencana" dengan rumus hitung yaitu "Jumlah Kampung Tangguh Bencana yang Dibina dibagi Jumlah Kampung Rawan Bencana dikali 100%".
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Penanggulangan Bencana.
- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2023 sebesar 4% untuk Persentase Kampung Tangguh Bencana, sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 0%. Dengan demikian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tidak tercapai dengan capaian sebesar 0%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 0%. Pada tahun 2023 capaian target tidak terdapat peningkatan.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu ke depan, sebagai berikut :

1. Belum ada nya dokumen pendukung untuk penentuan dan pembentukan Kampung Tangguh Bencana yaitu Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB)
2. Dokumen KRB dibuat pada Anggaran Perubahan Tahun 2023

3. Kondisi geografis Kabupaten Mahakam Ulu yang rawan terjadinya bencana alam
4. Meningkatnya alih fungsi lahan yang mengabaikan rencana tata ruang mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, sehingga meningkatkan potensi terjadinya bencana
5. Perubahan iklim global yang turut meningkatkan potensi terjadinya bencana alam
6. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu ke depan, sebagai berikut :

1. Belum ada nya dokumen pendukung untuk penentuan dan pembentukan Kampung Tangguh Bencana yaitu Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB)
 2. Dokumen KRB dibuat pada Anggaran Perubahan Tahun 2023
 3. Kondisi geografis Kabupaten Mahakam Ulu yang rawan terjadinya bencana alam
 4. Meningkatnya alih fungsi lahan yang mengabaikan rencana tata ruang mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, sehingga meningkatkan potensi terjadinya bencana
 5. Perubahan iklim global yang turut meningkatkan potensi terjadinya bencana alam
 6. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana.
- Diukur dengan indikator kinerja yaitu “Cakupan Penanggulangan Bencana” dengan rumus hitung yaitu “Jumlah penanganan Kejadian Bencana dibagi Jumlah Kejadian Bencana dikali 100%”.

- Diukur dengan indikator kinerja yaitu “Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana” dengan rumus hitung yaitu “Jumlah dokumen Penanganan Pasca Bencana dibagi Jumlah Kejadian Bencana dikali 100%”.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penanggulangan Bencana.
- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2023 sebesar Terwujudnya Pelayanan Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan baik , sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 100%. Dengan demikian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu telah mencapai target dengan capaian sebesar 100%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu ke depan, sebagai berikut :

1. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur
2. Masih Minimnya jumlah SDM aparatur yang berkompeten
3. Masih belum adanya SDM Aparatur yang berbasis kompetensi teknis

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kabupaten Mahakam Ulu ke depan, sebagai berikut :

1. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur
2. Masih Minimnya jumlah SDM aparatur yang berkompeten
3. Masih belum adanya SDM Aparatur yang berbasis kompetensi teknis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran	13
1.3 Dasar Hukum	14
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	17
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023	36
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	46
3.1 Capaian Kinerja	46
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	47
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	47
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	51

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	54
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	56
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	60
3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	62
BAB IV PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023	14
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	18
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023	34
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu	37
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023	42
Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023	43
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	47
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2023	48
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja	51
Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	54
Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	57
Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	60
Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	63
Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Penyusunan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu:

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, mempunyai tugas :
“menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang penganggulangan bencana daerah sesuai peraturan yang berlaku”.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai fungsi :

- Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,

penanganan darurat, penanganan pengungsi, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata;

- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;
- Mengendalikan pengumpulan serta penyaluran uang dan barang dalam usaha pencegahan bencana, penanganan darurat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara terpadu;
- Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

1. Kepala Badan

1. Penyusunan dan penetapan program kerja Badan; Pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
3. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawab Badan yang sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
4. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengarahan kegiatan di bidang penanggulanagan bencana.
5. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan public di lingkungan Badan.
6. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional pada Badan sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
7. Pengoordinasikan dalam susunan rencana kebutuhan Jabatan Fungsional dan pelaksana pada Badan;
8. Penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah di bidang penanggulangan bencana;

9. Pelaksanaan penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
10. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
11. Penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
12. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standart Pelayanan (SP) di lingkungan Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
13. Penyusunan, penetapan dan penginformasian peta rawan bencana;
14. Penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
15. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
16. Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
17. Pengendalian dalam pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
18. Pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Rencana Strategis Badan guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
20. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan pelaporan yang telah dilaksanakan oleh sekretariat dan bidang-bidang pada Badan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan

target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;

21. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan Inovasi, Reformasi Birokrat (RB), Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan public di lingkungan Badan;
22. Penyelenggaran evaluasi dan pelaporan atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Badan;
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
24. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier; dan
25. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah.

2. Sekretaris

1. Penyusunan rencana strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Badan setara dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Pengoordinasian penyusunan Cascading dan pohon kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam penyusunan Indikator Kinerja Individu, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi di lingkungan Badan;

3. Pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Badan;
4. Pengoordinasian dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan, Perjanjian Kinerja dan penilaian/pengukuran kinerja, Indikator Kinerja Individu (IKI) Pegawai;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas kesekretariatan Badan;
6. Pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan;
7. Pengoordinasian dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Badan;
8. Penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka Rencana Tindak Lanjut (RTL) perencanaan dan program kerja Badan;
9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan dan rencana kerja yang akan datang;
10. Pengoordinasian urusan kerumahtanggaan, perpustakaan dan kearsipan di lingkungan Badan;
11. Pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di lingkungan Badan;
12. Pelaksanaan pengelolaan, Pengadministrasian dan pembukuan/penatausahaan keuangan Badan;
13. Pelaksanaan proses verifikasi pertanggungjawaban keuangan sesuai prosedur sebagai dasar pembayaran;
14. Pengoordinasian pelaksanaan belanja kepada Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara dalam rangka pertanggungjawaban keuangan;
15. Pelaksanaan pengadaan, administrasi dan pemeliharaan barang milik Daerah di lingkungan Badan;
16. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah di lingkungan Badan;
17. Pelaksanaan publikasi, hubungan Masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;

18. Fasilitasi penataan kelembagaan dan tata laksana pada Badan;
19. Fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Badan;
20. Pengoordinasian penyusunan serta pelaksanaan sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) di lingkungan Badan;
21. Pelaksanaan dan pengevaluasian mandiri terhadap penyelenggaraan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan;
22. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Badan secara berkala;
23. Pengoordinasian penyusunan laporan kinerja Daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
24. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
25. Pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan laporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
26. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan Jabatan Fungsional dan pelaksana pada Badan;
27. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kesekretaritan Badan;
28. Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan sesuai dengan prosedur sebagai bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

29. Pengelolaan pembagian tugas kepada bawahan serta membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
30. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai dengan ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
31. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di bidang kesekretariatan; dan
32. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Subbagian Umum

1. Menghimpun, mengolah data dan Menyusun program kerja dan anggaran subbagian umum;
2. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan yang meliputi:
 - a. Mempersiapkan rapat;
 - b. Menerima tamu;
 - c. Pelayanan telpon;
 - d. Kebersihan;
 - e. Keamanan; dan Kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan rumah tangga Badan.
3. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan meliputi:
 - a. Menginventarisasi, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan pengurusan barang inventaris;
 - b. Menyusun laporan pengelolaan barang; dan
 - c. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan usul penghapusan sarana prasarana kantor.
4. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan meliputi:
 - a. Kegiatan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, penyajian data, dokumentasi dan informasi; dan

- b. Melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas.
5. Melaksanakan fungsi kehumasan dan protocol di lingkungan Badan;
- a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan lingkup tugas;
 - b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi:
6. Melaksanakan pengelolaan presensi pegawai;
- a. Melaksanakan pembinaan/pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pembuatan Daftar Nominatif Pegawai, File kepegawaian, Sasaran Kinerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, Buku penjagaan yaitu: Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Pensiun, Kartu Hukuman Disiplin dan lain-lain;
 - b. Mengusulkan rencana kebutuhan pegawai;
 - c. Menyiapkan usulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, mutase, cuti, bebas tugas/pension, perubahan gaji, hukuman disiplin tingkat ringan;
 - d. Memproses cuti tahunan, cuti bersalin, cuti hamil, cuti alasan penting, cuti di luar tanggung jawab negara dan cuti sakit bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Menyiapkan bahan pembinaan dan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai di lingkungan Badan;
 - f. Menyusun dan mengoodinasikan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
 - g. Menyiapkan Surat Perintah Tugas;
 - h. Mengelola Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang menjadi tanggung jawab Badan;
 - i. Menyiapkan bahan pelaksanaan/penerapan bidang pelayanan public dan reformasi birokrasi;

- j. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan subbagian umum berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan dan rencana kerja yang akan datang; dan
- k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja.

4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

1. Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja dan anggaran subbagian umum;
2. Perumusan kebijakan bidang pencegahan bencana, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan bencana, kesiapsiagaan dan pemberdayaan Masyarakat;
4. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau Lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan lingkup tugas;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang pencegahan bencan, kesiapsiagaan dan pemberdayaan Masyarakat;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan bencana, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat; dan
8. Pengelolaan dan pembagian tugas kepada bawahan serta membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
9. Pembinaan dan pengawasan, serta peniliam kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi krja serta pengembangan karier; dan

10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan secara lisan maupun tulisan sesuai tugas dan fungsi.

5. Bidang Kedaruratan dan Logistik

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik;
2. Perumusan kebijakan bidang tanggap darurat, perbaikan darurat, dukungan logistic dan peralatan;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang darurat, perbaikan darurat, dukungan logistic dan peralatan;
4. Pelaksanaan komando Kedaruratan dan Logistik pada saat tanggap darurat;
5. Pelaksanaan hubungan kerja bidang Kedaruratan dan Logistik pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistic;
6. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan di bidang Kedaruratan dan Logistik;
7. Pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi tingkat kedaruratan;
8. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengawasan dan pembinaan dibidang Kedaruratan dan Logistik;
9. Pemantauan, evaluasi dan Analisa laporan tentang pelaksanaan kebijakan pada bidang Kedaruratan dan Logistik pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
10. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan lingkup tugas;
11. Pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang tanggap darurat, perbaikan darurat, dukungan logistic dan peralatan;
12. Pengelolaan dan pembagian tugas kepada bawahan serta membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
13. Pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier; dan

14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan secara lisan maupun tulisan sesuai tugas dan fungsi.

6. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
2. Perumusan kebijakan bidang penilaian kerusakan, pemulihan dan peningkatan fisik, pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi serta pemberdayaan pengungsi;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang penilaian kerusakan, pemulihan dan peningkatan fisik, pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi serta pemberdayaan pengungsi;
4. Pelaksanaan komando Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada saat tanggap darurat;
5. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada pasca bencana;
6. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
7. Pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi tingkat Rehabilitasi;
8. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengawasan dan pembinaan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
9. Pemantauan, evaluasi, dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan pada bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada pasca bencana.
10. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan lingkup tugas;
11. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penilaian kerusakan, pemulihan dan peningkatan fisik, pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi serta pemberdayaan pengungsi;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penilaian kerusakan, pemulihan dan peningkatan fisik, pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi serta pemberdayaan pengungsi;

13. pengelolaan dan pembagian tugas kepada bawahan serta membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
14. pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan secara lisan maupun tulisan sesuai tugas dan fungsi.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Berikut bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu



Sumber : Gambar 2.1 Rencana Strategis BPBD TA. 2021-2026

1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu:

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2022	Rp 3.310.992.618
APBD	Tahun 2023	Rp 12.092.843.803
DBH-DR	Tahun 2023	Rp 7.332.795.129
FCPF	Tahun 2023	Rp. 200.000.000

Sumber : Laporan Realisasi DBH-DR TA. 2023, Laporan FCPF TA. 2023 dan DPPA BPBD TA. 2023

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan

Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

7. Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 adalah:

BAB I	PENDAHULUAN
	Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (<i>strategic issued</i>) yang sedang dihadapi.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
3.1	Capaian Kinerja Organisasi
	Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
3.2	Realisasi Anggaran
	Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi

	diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
BAB IV	PENUTUP
	Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
LAMPIRAN	
1	Perjanjian Kinerja.
2	Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Meningkatkan Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja, Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (Sub-Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Capaian pada tahun				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
										2021		2022		RKPD 2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										CAPAIA N	R p	CAPAIA N	R p	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp			targ et	Rp	targ et
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
Meningkatkan Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	0%	0%	0	100%	3.310.992.618	100%	7.392.432.603	100%	17.934.838.803	100%	16.685.795.103	100%	17.245.795.103	100%	18.140.795.103	100%	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	-	0	100%	101.870.400	100%	97.496.300	100%	385.000.000	100%	450.000.000	100%	485.000.000	100%	520.000.000	100%	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	0				100%	60.000.000	100%	70.000.000	100%	75.000.000	100%	80.000.000	100%	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu	
		1	0	0	2.0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	0				100%	60.000.000	100%	70.000.000	100%	75.000.000	100%	70.000.000	100%	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (Sub-Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Capaian pada tahun				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
										2021		2022		RKPD 2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										CAPAIA N	R p	CAPAIA N	R p	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp			targ et	Rp	targ et	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
		1	0	0	2.0	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	0	100%	46.730.700	100%	46.730.700	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	2.0	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	0	100%		100%	21.254.400	100%	60.000.000	100%	70.000.000	100%	75.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	2.0	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	0	100%	14.197.900			100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	75.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	0	100%	22.638.800	100%	11.208.200	100%	45.000.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	2.0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0	100%	18.303.000	100%	18.303.000	100%	60.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (Sub-Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Capaian pada tahun				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi					
									2021		2022		RKPD 2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
									CAPAIA N	R p	CAPAIA N	R p	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp			targ et	Rp	targ et	Rp	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
		1	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Teradministrasinya keuangan perangkat daerah dengan baik	-	-	0	100%	2.349.876.498	100%	4.289.755.003	100%	4.315.795.103	100%	4.390.795.103	100%	4.405.795.103	100%	4.410.795.103	100%	4.410.795.103	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	-	-	0	100%	2.173.499.498	100%	3.975.755.103	100%	3.975.755.103	100%	3.975.755.103	100%	3.975.755.103	100%	3.975.755.103	100%	3.975.755.103	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	2.0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya ASN yang terkait tugas administrasi tambahan	-	-	0	100%	129.360.000	100%	260.040.000	100%	260.040.000	100%	260.040.000	100%	260.040.000	100%	260.040.000	100%	260.040.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	2.0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	0			100%	12.371.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	45.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	2.0	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	0					100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	2.0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	0	100%	21.966.000	100%	26.089.500			100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (Sub-Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Capaian pada tahun				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi					
										2021		2022		RKPD 2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										CAPAIA N	R p	CAPAIA N	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp			targ et	Rp	targ et	Rp	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
		1	0	0	2.0	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	-	0								100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu		
		1	0	0	2.0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	0	100%	25.051.000	100 %	15.499.400	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	55.000.000	100 %	55.000.000	100 %	55.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu	
		1	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Teradministrasinya kepegawaian perangkat daerah dengan baik	-	-	0	100%	0	100 %	0	100 %	750.000.000	100 %	1.100.000.000	100 %	1.250.000.000	100 %	1.400.000.000	100 %	1.400.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu	
		1	0	0	2.0	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai	-	-	0				100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	2.0	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	0				100 %	250.000.000	100 %	300.000.000	100 %	350.000.000	100 %	400.000.000	100 %	400.000.000	100 %	400.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (Sub-Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Capaian pada tahun				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
									2021		2022		RKPD 2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
									CAPAIA N	R p	CAPAIA N	R p	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp			targ et	Rp	targ et
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		1	0	0	2.0	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan	-	-	0						100 %	250.000.000	100 %	300.000.000	100 %	350.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu	
		1	0	0	2.0	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terimplementasinya bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	-	-	0			100 %	350.000.000	100 %	400.000.000	100 %	450.000.000	100 %	500.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu		
		1	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah	-	-	0	100%	480.955.720	100 %	1.068.265.300	100 %	2.734.123.700	100 %	2.310.000.000	100 %	2.670.000.000	100 %	3.375.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	2.0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik serta jasa instalasi Listrik	-	-	0	100%	11.791.000	100 %	12.428.000	100 %	12.428.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	2.0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor serta peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	0	100%	207.987.820	100 %	291.360.300	100 %	895.135.700	100 %	300.000.000	100 %	400.000.000	100 %	450.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	2.0	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	-	-	0						100 %	65.000.000	100 %	70.000.000	100 %	75.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu	

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (Sub-Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Capaian pada tahun				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
									2021		2022		RKPD 2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
									CAPAIA N	R p	CAPAIA N	R p	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp			targ et	Rp	targ et	Rp
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
		1	0	0	2.0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	-	-	0	100%	28.356.300	100%	68.400.000	100%	380.260.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu	
		1	0	0	2.0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	-	-	0	100%	1.665.600	100%	18.790.000	100%	30.000.000	100%	45.000.000	100%	50.000.000	100%	550.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu	
		1	0	0	2.0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	0						100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	-	-	0	100%	231.155.000	100%	677.287.000	100%	1.066.300.000	100%	1.250.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.650.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu	
		1	0	0	2.0	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	0				100%	350.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	-	-	0	100%	230.000.000	100%	250.000.000	100%	7.350.000.000	100%	5.200.000.000	100%	5.200.000.000	100%	5.200.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu	

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (Sub-Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Capaian pada tahun				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi					
									2021		2022		RKPD 2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
									CAPAIA N	R p	CAPAIA N	R p	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp			targ et	Rp	targ et	Rp	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
		1	0	0	2.0	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	-	-	0				100	6.600.000.00	100	1.000.000.00	100	1.000.000.00	100	1.000.000.00	100	1.000.000.00	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu	
		1	0	0	2.0	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	0				100	3.500.000.00	100	3.500.000.00	100	3.500.000.00	100	3.500.000.00	100	3.500.000.00	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu	
		1	0	0	2.0	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel untuk kantor	-	-	0				100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu	
		1	0	0	2.0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	0				100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu	
		1	0	0	2.0	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	0	100%	230.000.00	100	250.000.00	100	450.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan perangkat daerah	-	-	0	100%	148.290.00	100	1.293.600.00	100	2.099.920.00	100	2.485.000.00	100	2.485.000.00	100	2.485.000.00	100	2.485.000.00	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (Sub-Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Capaian pada tahun				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
										2021		2022		RKPD 2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										CAPAIA N	R p	CAPAIA N	R p	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp			targ et	Rp	targ et	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
		1	0	0	2.0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materi dan jasa pengiriman	-	-	0	100%	7.500.000	100%	10.800.000	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	2.0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	-	-	0	100%	49.500.000	100%	66.000.000	100%	120.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	2.0	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	0							100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	2.0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya gaji/honorarium tenaga kontrak/PTT	-	-	0	100%	91.290.000	100%	1.216.800.000	100%	1.964.920.000	100%	2.300.000.000	100%	2.300.000.000	100%	2.300.000.000	100%	2.300.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	-	-	0	100%	0	100%	393.316.000	100%	300.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	2.0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	-	-	0				393.316.000			100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (Sub-Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Capaian pada tahun				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
										2021		2022		RKPD 2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										CAPAIA N	R p	CAPAIA N	R p	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp			targ et	Rp	targ et	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
							Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
		1	05	01	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	0					100 %	300.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	05	01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	0								100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu	
		1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	-	-	0								100 %		100 %		100 %		BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu	
		1	05				Kebencanaan		-	-	0														BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu	

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (Sub-Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Capaian pada tahun				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi					
									2021		2022		RKPD 2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
									CAPAIA N	R p	CAPAIA N	R p	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp			targ et	Rp	targ et	Rp	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
		1	0	0	20	0	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	0				100 %	686.831.800	100 %	750.000.000	100 %	750.000.000	100 %	750.000.000			BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu	
		1	0	0	20	0	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk Warga Negara maupun Aparatur di Kawasan Rawan Bencana	-	-	0	100%	629.881.260		100 %	536.782.600	100 %	600.000.000	100 %	750.000.000	100 %	800.000.000			BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu	
		1	0	0	20	0	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	-	-	0			100 %	620.038.000	100 %	5.917.500.000	100 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000			BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	20	0	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	0							100 %	300.000.000	100 %	350.000.000	100 %	350.000.000			BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (Sub-Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Capaian pada tahun				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
										2021		2022		RKPD 2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										CAPAIA N	R p	CAPAIA N	R p	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp			targ et	Rp	targ et	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
		1	0	0	20	0	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	-	-	0			100 %	184.935.000			100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	20	0	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Kawasan-Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	-	-	0							100 %	900.000.000	100 %	900.000.000	100 %	900.000.000	100 %	900.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	20	0	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Provinsi dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	-	-	0	100%	370.790.000			100 %	1.661.762.900	100 %	1.600.000.000	100 %	1.600.000.000	100 %	1.600.000.000	100 %	1.600.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	20	0	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	-	-	0					100 %	654.424.200	100 %	750.000.000	100 %	750.000.000	100 %	750.000.000	100 %	750.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	20	1	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana prioritas di Daerah	-	-	0					100 %	514.383.400	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (Sub-Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Capaian pada tahun				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
										2021		2022		RKPD 2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										CAPAIA N	R p	CAPAIA N	R p	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp			targ et	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1	0	0	20	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	-	-	0	100%	45.021.600			100%		100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	20	1	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-	-	0			567.564.900		100%	650.000.000	100%	700.000.000	100%	750.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu		
		1	0	0	20		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	-	0	100%	1.356.272.700	100%	1.068.400.000	100%	7.498.520.000	100%	4.450.000.000	100%	4.450.000.000	100%	4.450.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	20	0	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	-	-	0					100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu		
		1	0	0	20	0	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	-	-	0			100%	1.530.790.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (Sub-Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Capaian pada tahun				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi					
										2021		2022		RKPD 2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										CAPAIA N	R p	CAPAIA N	R p	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp			targ et	Rp	targ et	Rp	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
		1	0	0	20	0	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	-	-	0			100 %	1.068.400.000	100 %	800.000.000	100 %	750.000.000	100 %	750.000.000	100 %	750.000.000	100 %	750.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu	
		1	0	0	20	0	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	0	100%	897.326.000			100 %	908.264.000	100 %	1.200.000.000	100 %	1.200.000.000	100 %	1.200.000.000	100 %	1.200.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu	
		1	0	0	20	0	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi,	-	-	0	100%	458.946.700			100 %	4.259.466.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu	
		1	0	0	20	0	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	-	-	0								100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (Sub-Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Capaian pada tahun				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi					
									2021		2022		RKPD 2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
									CAPAIA N	R p	CAPAIA N	R p	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp			targ et	Rp	targ et	Rp	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
		1	0	0	20		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana	-	-	0	100%	140.288.100	100%	0	100%	6.424.338.000	100%	6.600.000.000	100%	6.950.000.000	100%	7.000.000.000	100%	7.000.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	20	0	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	-	-	0	100%	69.873.200	100%	0	100%	817.589.100	100%	950.000.000	100%	950.000.000	100%	950.000.000	100%	950.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	20	0	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	-	-	0	100%	0	100%	0	100%	734.104.500	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	20	0	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	-	-	0	100%	0	100%	0	100%	398.126.800	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu
		1	0	0	20	0	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	-	-	0	100%	0	100%	0	100%	795.165.800	100%	500.000.000	100%	650.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (Sub-Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Capaian pada tahun				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi					
										2021		2022		RKPD 2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
										CAPAIA N	R p	CAPAIA N	R p	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp			targ et	Rp	targ et	Rp	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
		1	0	0	20	0	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-	-	0								100 %	350.000.000	100 %	350.000.000	100 %	350.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu		
		1	0	0	20	0	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	-	-	0	100%	70.414.900						100 %	3.679.351.800	100 %	3.800.000.000	100 %	4.000.000.000	100 %	4.000.000.000	BPBD	Kabupaten Mahakam Ulu

Sumber : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Periode 2021 – 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Pelayanan Kebencanaan Daerah	Persentase Kampung Tangguh Bencana	Jumlah Kampung Tangguh Bencana yang Dibina dibagi Jumlah Kampung Rawan Bencana dikali 100%	NA	0%	4%	12%	20%	30%
		Cakupan Penanggulangan Bencana	Jumlah penanganan Kejadian Bencana dibagi Jumlah Kejadian Bencana dikali 100%	NA	100%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah dokumen Penanganan Pasca Bencana dibagi Jumlah Kejadian Bencana dikali 100%	NA	70%	80%	80%	80%	100%
2	Terwujudnya Nilai IKD	Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Jumlah keterisian IKD	NA	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023

Sumber: SK Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022-2026

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 :

**Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023 Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Awal	Usulan Perubahan	Prakiraan Maju Tahun 2024
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 12,281,978,376	Rp 16,160,388,076	Rp 16,160,388,076
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp 12,281,978,376	Rp 16,160,388,076	Rp 16,160,388,076
	1	0 5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rp 12,281,978,376	Rp 16,160,388,076	Rp 16,160,388,076
	1	0 5	0 3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp 3,305,462,300	Rp 5,830,531,500	Rp 5,830,531,500
	1	0 5	0 3	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 1,232,089,300	Rp 1,683,664,900	Rp 1,683,664,900
	1	0 5	0 3	2.01	0 2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Rp 1,232,089,300	Rp 1,683,664,900	Rp 1,683,664,900
	1	0 5	0 3	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp 1,004,973,000	Rp 1,828,571,500	Rp 1,828,571,500
	1	0 5	0 3	2.02	0 2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
	1	0 5	0 3	2.02	0 3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp 620,038,000	Rp 620,038,000	Rp 620,038,000
	1	0 5	0 3	2.02	0 5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Rp 184,935,000	Rp 184,935,000	Rp 184,935,000
	1	0 5	0 3	2.02	0 8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Rp -	Rp 306,650,600	Rp 306,650,600
	1	0 5	0 3	2.02	1 2	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Rp -	Rp 516,947,900	Rp 516,947,900
	1	0 5	0 3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp 1,068,400,000	Rp 1,976,915,300	Rp 1,976,915,300
	1	0 5	0 3	2.03	0 1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Rp -	Rp 218,365,300	Rp 218,365,300

	1	0	0	2.03	0	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp 1,068,400,000	Rp 1,758,550,000	Rp 1,758,550,000
	1	0	0	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp -	Rp 341,379,800	Rp 341,379,800
	1	0	0	2.04	0	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Rp -	Rp 341,379,800	Rp 341,379,800
	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 8,976,516,076	Rp 10,329,856,576	Rp 10,329,856,576
	1	0	0	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 97,496,300	Rp 132,200,800	Rp 132,200,800
	1	0	0	2.01	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 46,730,700	Rp 46,730,700	Rp 46,730,700
	1	0	0	2.01	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 21,254,400	Rp 30,294,400	Rp 30,294,400
	1	0	0	2.01	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp -	Rp 6,364,500	Rp 6,364,500
	1	0	0	2.01	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 11,208,200	Rp 22,208,200	Rp 22,208,200
	1	0	0	2.01	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 18,303,000	Rp 26,603,000	Rp 26,603,000
	1	0	0	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4,279,527,576	Rp 4,297,156,576	Rp 4,297,156,576
	1	0	0	2.02	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3,965,527,676	Rp 3,965,527,676	Rp 3,965,527,676
	1	0	0	2.02	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 260,040,000	Rp 260,040,000	Rp 260,040,000
	1	0	0	2.02	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 12,371,000	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000
	1	0	0	2.02	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 26,089,500	Rp 26,089,500	Rp 26,089,500
	1	0	0	2.02	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 15,499,400	Rp 15,499,400	Rp 15,499,400

	1	0 5	0 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp -	Rp 240,096,000	Rp 240,096,000
	1	0 5	0 1	2.02	0 9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp -	Rp 240,096,000	Rp 240,096,000
	1	0 5	0 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1,662,576,200	Rp 2,500,424,200	Rp 2,500,424,200
	1	0 5	0 1	2.06	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 12,428,000	Rp 12,428,000	Rp 12,428,000
	1	0 5	0 1	2.06	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 886,309,200	Rp 932,879,200	Rp 932,879,200
	1	0 5	0 1	2.06	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 68,400,000	Rp 123,955,000	Rp 123,955,000
	1	0 5	0 1	2.06	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 18,790,000	Rp 18,790,000	Rp 18,790,000
	1	0 5	0 1	2.06	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 676,649,000	Rp 1,062,372,000	Rp 1,062,372,000
	1	0 5	0 1	2.06	1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp -	Rp 350,000,000	Rp 350,000,000
	1	0 5	0 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 250,000,000	Rp 450,000,000	Rp 450,000,000
	1	0 5	0 1	2.07	0 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 250,000,000	Rp 450,000,000	Rp 450,000,000
	1	0 5	0 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1,293,600,000	Rp 1,404,120,000	Rp 1,404,120,000
	1	0 5	0 1	2.08	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 10,800,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000
	1	0 5	0 1	2.08	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 66,000,000	Rp 66,000,000	Rp 66,000,000
	1	0 5	0 1	2.08	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1,216,800,000	Rp 1,323,120,000	Rp 1,323,120,000
	1	0 5	0 1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1,393,316,000	Rp 1,305,859,000	Rp 1,305,859,000

	1	0 5	0 1	2.09	0 1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 1,393,316,000	Rp 1,305,859,000	Rp 1,305,859,000
	1	0 5	0 1	2.09	0 2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp -	Rp 123,180,000	Rp 123,180,000

Sumber : Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2023

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Kebencanaan Daerah	Persentase Kampung Tangguh Bencana	12%
		Cakupan Penanggulangan Bencana	100%
		Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	80%
2.	Terwujudnya Pelayanan Perangkat Daerah yang	Pelayanan Perangkat Daerah	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	dilaksanakan dengan baik	Yang Dilaksanakan Dengan Baik	

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp . 8,987,381,503
2. Program Penanggulangan Bencana	Rp . 3,105,462,300

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu:

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023

No.	Sasaran Startegis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Kampung Tangguh Bencana	12%

No.	Sasaran Startegis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Cakupan Penanggulangan Bencana	100%
		Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	80%
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Dengan Baik	100%

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023*

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 97,496,300
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4,289,755,003
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1,663,214,200
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 250,000,000
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1,293,600,000
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1,393,316,000
7.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 1,232,089,300
8.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp. 620,038,000
9.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp. 1,068,400,000
10.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp. 184,935,000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Pelayanan Kebencanaan Daerah	Persentase Kampung Tangguh Bencana	4%	0	0	Sangat Rendah	Perjanjian Kinerja Tahun 2023
		Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Perjanjian Kinerja Tahun 2023
		Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	80%	100%	100%	Sangat Tinggi	Perjanjian Kinerja Tahun 2023
2	Terwujudnya Pelayanan Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan baik	Pelayanan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Dengan Baik	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sumber ; Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan capaian kinerja diatas untuk sasaran strategis Terwujudnya Pelayanan Kebencanaan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Kampung Tangguh Bencana belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 4% dan Realisasi sebesar 0%, Indikator Cakupan Penanggulangan Bencana dengan capaian sangat tinggi, berdasarkan Target Kinerja yang telah ditetapkan sebesar 100% dan Realisasi 100%, Indikator Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan capaian sangat tinggi, berdasarkan Target Kinerja yang telah ditetapkan sebesar 80% dan Realisasi 100%, dan Indikator Pelayanan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Dengan Baik dengan capaian sangat tinggi, berdasarkan Target Kinerja yang telah ditetapkan sebesar 100% dan Realisasi 100%.

Faktor penghambat belum tercapainya indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Minimnya Jumlah Masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan layanan informasi rawan bencana.
2. Terkendala waktu sehingga pelaksanaan sosialisasi tidak terlaksana.
3. Belum terlegalisasinya Dokumen Pendukung dalam penentuan Kampung Rawan Bencana yaitu Dokumen KRB.
4. Belum membuat Dokumen RPB dan Dokumen RENKON sebagai acuan dalam menanggulangi bencana secara tepat dan akurat.

Upaya BPBD dalam meningkatkan capaian Jumlah Kecamatan Tangguh Bencana:

1. Upaya yang akan dilakukan BPBD Kabupaten Mahakam Ulu untuk meningkatkan persentase Jumlah Kecamatan Tangguh Bencana adalah dengan melakukan pelatihan terhadap satgas

2. Menambah anggaran untuk membuat Dokumen Pendukung dan Pelatihan terhadap Warga di Kawasan Rawan Bencana serta Pendataan Terhadap Warga Di Kawasan Rawan Bencana
3. Membuat dokumen pendukung perencanaan Penanggulangan Bencana dan di Review setiap Tahunnya agar lebih Akurat dan Tepat Sasaran.
4. Pelaksanaan Kegiatan secara tepat waktu sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan.
5. Melakukan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana agar dapat melayani Masyarakat secara maksimal.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Pelayanan Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan baik	Pelayan an Perangka t Daerah Yang Dilaksan akan	-	-	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Dengan Baik						
2	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Persentase Kampung Tangguh Bencana	-	-	0%	4	0%	0%
		Cakupan Penanggulangan Bencana	-	-	100%	100%	100%	100%
		Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	-	-	70%	80%	80%	100%

Sumber : LKjIP Ta. 2022

Berdasarkan Tabel di atas dapat di sampaikan bahwa pa Berdasarkan capaian kinerja diatas untuk sasaran strategis Terwujudnya Pelayanan Kebencanaan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Kampung Tangguh Bencana belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 4% dan Realisasi sebesar 0%, Indikator Cakupan Penanggulangan Bencana dengan capaian sangat tinggi, berdasarkan Target Kinerja yang telah ditetapkan sebesar 100% dan Realisasi 100%, Indikator Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan capaian sangat tinggi, berdasarkan Target Kinerja yang telah ditetapkan sebesar 80% dan

Realisasi 100%, dan Indikator Pelayanan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Dengan Baik dengan capaian sangat tinggi, berdasarkan Target Kinerja yang telah ditetapkan sebesar 100% dan Realisasi 100%.

Faktor penghambat belum tercapainya indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Minimnya Jumlah Masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan layanan informasi rawan bencana.
2. Terkendala waktu sehingga pelaksanaan sosialisasi tidak terlaksana.
3. Belum terlegalisasinya Dokumen Pendukung dalam penentuan Kampung Rawan Bencana yaitu Dokumen KRB.
4. Belum membuat Dokumen RPB dan Dokumen RENKON sebagai acuan dalam menanggulangi bencana secara tepat dan akurat.

Upaya BPBD dalam meningkatkan capaian Jumlah Kecamatan Tangguh Bencana:

1. Upaya yang akan dilakukan BPBD Kabupaten Mahakam Ulu untuk meningkatkan persentase Jumlah Kampung Tangguh Bencana adalah dengan melakukan pelatihan terhadap satgas
2. Menambah anggaran untuk membuat Dokumen Pendukung dan Pelatihan terhadap Warga di Kawasan Rawan Bencana serta Pendataan Terhadap Warga Di Kawasan Rawan Bencana
3. Membuat dokumen pendukung perencanaan Penanggulangan Bencana dan di Review setiap Tahunnya agar lebih Akurat dan Tepat Sasaran.

4. Pelaksanaan Kegiatan secara tepat waktu sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan.
5. Melakukan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana agar dapat melayani Masyarakat secara maksimal.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	Terwujudnya Pelayanan Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan baik	Pelayanan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Dengan Baik	100%	100%	68,89
	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggul	Persentase Kampung Tangguh Bencana	0%	30%	0%
		Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	angan bencana	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100%	100%	100%

Sumber : Renstra BPBD TA. 2022-2026

Berdasarkan Tabel di atas dapat di sampaikan bahwa Berdasarkan capaian kinerja untuk sasaran strategis Terwujudnya Pelayanan Kebencanaan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Kampung Tangguh Bencana belum mencapai target dengan Realisasi sebesar 0%, Indikator Cakupan Penanggulangan Bencana dengan Realisasi 100%, Indikator Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan Realisasi 100%, dan Indikator Pelayanan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Dengan Baik dengan capaian sangat tinggi, berdasarkan Target Kinerja yang telah ditetapkan sebesar 100% dan Realisasi 100%.

Faktor penghambat belum tercapainya indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Minimnya Jumlah Masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan layanan informasi rawan bencana.
2. Terkendala waktu sehingga pelaksanaan sosialisasi tidak terlaksana.
3. Belum terlegalisasinya Dokumen Pendukung dalam penentuan Kampung Rawan Bencana yaitu Dokumen KRB.

4. Belum membuat Dokumen RPB dan Dokumen RENKON sebagai acuan dalam menanggulangi bencana secara tepat dan akurat.

Upaya BPBD dalam meningkatkan capaian Jumlah Kecamatan Tangguh Bencana:

1. Upaya yang akan dilakukan BPBD Kabupaten Mahakam Ulu untuk meningkatkan persentase Jumlah Kecamatan Tangguh Bencana adalah dengan melakukan pelatihan terhadap satgas
2. Menambah anggaran untuk membuat Dokumen Pendukung dan Pelatihan terhadap Warga di Kawasan Rawan Bencana serta Pendataan Terhadap Warga Di Kawasan Rawan Bencana
3. Membuat dokumen pendukung perencanaan Penanggulangan Bencana dan di Review setiap Tahunnya agar lebih Akurat dan Tepat Sasaran.
4. Pelaksanaan Kegiatan secara tepat waktu sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan.
5. Melakukan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana agar dapat melayani Masyarakat secara maksimal.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Pelayanan Perangkit Daerah Yang Dilaksanakan Dengan Baik	Pelayanan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Dengan Baik	100%	100%	100%	Hal ini berhasil dikarenakan adanya Inovasi serta dukungan sarana dan prasarana pendukung yang memadai	Melakukan Inovasi agar Pelayanan yang diberikan dapat maksimal
2	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Persentase Kampung Tangguh Bencana	0%	0%	0%	Belum dibentuknya Kampung Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	Sosialisasi dan pelatihan-pelatihan mengenai mitigasi bencana yang diadakan oleh lembaga-lembaga bersertifikasi untuk mendorong peningkatan kompetensi
		Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	Sudah maksimal dalam merespon laporan kejadian bencana	Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi baik berupa bantuan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							keuangan maupun bantuan peralatan dan perlengkap an penangan an /mitigasi bencana
		Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruk si Pasca Bencana	80%	100%	100%	Masih minimnya jumlah SDM Aparatur yang berkompeten	Banyaknya pelatihan- pelatihan mengenai rehabilitasi dan rekonstruks i pasca bencana yang diadakan oleh lembaga- lembaga bersertifikas i untuk mendorong peningkatan kompetensi aparatur

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan pengukuran kinerja diatas untuk sasaran strategis Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dengan indikator kinerja Persentase Jumlah Kampung Tangguh Bencana belum mencapai target yang ditetapkan dalam

dokumen perencanaan yaitu sebesar 30% dari target yang telah ditetapkan.

Faktor penghambat belum tercapainya indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Minimnya Jumlah Masyarakat yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;
2. Terkendala waktu sehingga pelaksanaan sosialisasi tidak terlaksana.

Upaya BPBD dalam meningkatkan capaian Persentase Jumlah Kampung Tangguh Bencana:

1. Upaya yang akan dilakukan BPBD Kabupaten Mahakam Ulu untuk meningkatkan persentase Jumlah Kampung Tangguh Bencana adalah dengan melakukan pelatihan terhadap satgas dan menambah anggaran untuk kegiatan sosialisasi serta dokumen pendukung perencanaan diperbarui setiap tahunnya.

Berdasarkan pengukuran kinerja diatas untuk sasaran strategis Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dengan indikator kinerja Cakupan Penanggulangan Bencana telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan yaitu sebesar 100% dari target 100% yang telah ditetapkan atau dengan capaian 100%

Upaya BPBD dalam mencapai capaian Cakupan Penanggulangan Bencana dari jumlah kejadian bencana tahun 2023 terdampak telah dilaksanakan sepenuhnya dengan memberikan layanan penanggulangan bencana.

Berdasarkan pengukuran kinerja diatas untuk sasaran strategis Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dengan indikator kinerja Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan yaitu sebesar 80% dari target 100% yang telah ditetapkan atau dengan capaian 100%.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Indikator Kinerja	Tingkat Efektivitas dan Efisiensi	
		2022	2023
1	PELAYANAN PERANGKAT DAERAH YANG DILAKSANAKAN DENGAN BAIK	136%	109%
2	CAKUPAN PENANGGULANGAN BENCANA	135%	199%
3	CAKUPAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	100%	117%
4	PERSENTASE KAMPUNG TANGGUH BENCANA	101%	0%

Tujuan dan Sasaran

Sumber : Laporan Data IKU BPBD Ta. 2022 & 2023

Tabel tersebut merupakan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran tujuan serta sasaran pada tahun 2022 dan

2023, dengan fokus pada efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Berikut adalah penjelasan untuk setiap indikator kinerja yang disajikan dalam tabel:

1. Pelayanan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan dengan Baik:

Pada tahun 2022, pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik mencapai tingkat efektivitas sebesar 136%, yang menunjukkan kinerja yang sangat baik dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Namun, pada tahun 2023, efektivitas menurun menjadi 109%. Meskipun masih di atas 100%, penurunan ini menunjukkan adanya potensi peningkatan dalam efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai kinerja yang optimal.

2. Cakupan Penanggulangan Bencana:

Pada tahun 2022, cakupan penanggulangan bencana mencapai tingkat efektivitas sebesar 135%, yang menunjukkan kinerja yang baik. Kemudian, pada tahun 2023, efektivitas meningkat menjadi 199%, menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dalam penanggulangan bencana.

3. Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana:

Pada tahun 2022, cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana mencapai tingkat efektivitas sebesar 100%, menunjukkan pencapaian target yang sesuai.

Pada tahun 2023, efektivitas meningkat menjadi 117%, menunjukkan peningkatan dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

4. Persentase Kampung Tangguh Bencana:

Pada tahun 2022, persentase kampung tangguh bencana mencapai tingkat efektivitas sebesar 101%, menunjukkan pencapaian target dengan sedikit kelebihan.

Namun, pada tahun 2023, efektivitas menurun menjadi 0%, menunjukkan bahwa tidak ada kampung yang memenuhi kriteria sebagai kampung tangguh bencana pada tahun tersebut. Hal ini menunjukkan adanya potensi perbaikan dalam strategi atau implementasi untuk mencapai tujuan tersebut.

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Pelayanan Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan baik	Pelayanan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Dengan Baik	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Dengan Baik	100%	Menunjang	
2	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana	Persentase Kampung Tangguh Bencana	0%	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Kampung Tangguh Bencana	0%	Tidak Menunjang	
		Cakupan Penanggulangan Bencana	100%		Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	Menunjang	
		Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	80%		Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	80%	Menunjang	

Sumber : Perjanjian Kinerja BPBD

Realisasi Anggaran Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi

penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3.310.992.618	15.479.370.584	2.434.451.431	14.204.729.457	73,53%	91,77%	3567,5%	483,5%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah Kabupaten/Kota	101.870.400	100.992.500	101.023.800	91.224.700	99,17%	90,33%	-0,9%	-9,7%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.349.876.498	4.477.520.584	1.520.215.550	3.923.084.863	64,69%	87,62%	90,5%	158,1%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	221.392.000	-	213.714.672	0,00%	96,53%		
Administrasi Umum Perangkat					-		445,0%	461,8%

Daerah	480.955.720	2.621.429.500	448.722.081	2.520.934.238		96,17%		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	230.000.000	450.000.000	230.000.000	450.000.000	-	10,00%	95,7%	95,7%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.290.000	1.400.160.000	134.490.000	1.233.916.750	90,69%	88,13%	844,2%	817,5%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	6.207.876.000	-	5.771.854.234	0,00%	92,98%		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.542.253.660	8.769.399.100	2.007.069.375	5.491.640.505	78,95%	62,62%	244,9%	173,6%
Pelayanan Informasi Rawan Bencana	-	2.943.455.200	-	2.222.283.081	0,00%	75,50%		

Kabupaten/Kota								
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.116.107.760	3.884.639.250	1.073.613.900	2.797.591.824	96,19%	72,02%	248,1%	160,6%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.356.272.700	1.941.304.650	933.455.475	471.765.600	68,83%	24,30%	43,1%	-49,5%
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	69.873.200	-	69.833.200	-	99,94%	0,00%	-100,0%	-100,0%
Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	Anggaran	Realisasi
TOTAL ANGGARAN	5.853.246.278	24.248.769.684	4.441.520.806	19.696.369.962	75,88%	81,23%	314,3%	343,5%

Sumber : Renstra BPBD 2021 - 2026

Dari tabel di atas secara umum, terjadi peningkatan capaian penggunaan anggaran dari tahun 2022 (75,88%) ke tahun 2023 (81,23%). Hal ini menandakan perencanaan penganggaran sudah dilakukan dengan lebih bijaksana, efektif dan efisien. Terjadi lonjakan anggaran yang sangat tinggi pada tahun 2023 (sekitar 314%). Hal ini dikarenakan pemenuhan kebutuhan dasar pada OPD yang baru beroperasional. Kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran dan penunjang urusan kebencanaan yang bersifat mendesak dalam mendukung kegiatan penanganan bencana.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu memiliki 2 sasaran strategis yaitu Terwujudnya Pelayanan Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan baik dan Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu adalah


- Belum ada nya dokumen pendukung untuk penentuan dan pembentukan Kampung Tangguh Bencana yaitu Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB)
- Dokumen KRB dibuat pada Anggaran Perubahan Tahun 2023
- Tidak ada penetapan status Tanggap Darurat Bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Bupati
- Pada tahun 2022 dan 2023 belum terbentuknya tim Jitupasna Kabupaten

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut:

1. Belum ada nya dokumen pendukung untuk penentuan dan pembentukan Kampung Tangguh Bencana yaitu Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB)
2. Dokumen KRB dibuat pada Anggaran Perubahan Tahun 2023
3. Tidak ada penetapan status Tanggap Darurat Bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Bupati
4. Pada tahun 2022 dan 2023 belum terbentuknya tim Jitupasna Kabupaten.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Mahakam Ulu.

Ujung Bilang 28 Desember 2023
Kepala Pelaksana BPBD



Agus Darmawan, S.Pd., M.Si
NIP. 19790816 200312 1 008

**LAMPIRAN Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala
Perangkat Daerah Tahun 2023** Dilampirkan Scan PK Kepala
Perangkat Daerah Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jalan Poros Ujoh Bilang – Long Melaham RT.XV Kecamatan Long Bagun



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Agus Darmawan, S.Pd, M.Si.**
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Bonifasius Belawan Geh, SH, ME.**
Jabatan : Bupati Mahakam Ulu
selanjutnya disebut **pihak kedua**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ujoh Bilang, 16 Januari 2023

Pihak Kedua,

Bonifasius Belawan Geh, SH, ME

Pihak Pertama,

Agus Darmawan, S.Pd, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jalan Poros Ujoh Bilang – Long Melaham RT.XV Kecamatan Long Bagun



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Pelayanan Kebencanaan Daerah	Persentase Kampung Tangguh Bencana	4%
		Cakupan Penanggulangan Bencana	100%
		Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	80%
2.	Terwujudnya Pelayanan Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan baik	Pelayanan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Dengan Baik	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8,987,381,503	APBD
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 3,105,462,300	APBD
JUMLAH		Rp. 12,092,843,803	

Ujoh Bilang, 16 Januari 2023

Pihak Kedua,

Bonifasius Belawan Geh, SH, ME

Pihak Pertama,

Agus Darmawan, S.Pd, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jalan Poros Ujoh Bilang – Long Melaham RT.XV Kecamatan Long Bagun



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Marcelly, M.Pd**
Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Agus Darmawan, S.Pd, M.Si.**
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
selanjutnya disebut **pihak kedua**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ujoh Bilang, 16 Januari 202

Pihak Kedua,

Agus Darmawan, S.Pd, M.Si

Pihak Pertama,

Marcelly, M.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jalan Poros Ujoh Bilang – Long Melaham RT.XV Kecamatan Long Bagun



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Dengan Baik	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8,987,381,503	APBD
JUMLAH		Rp. 8,987,381,503	

Ujoh Bilang, 16 Januari 2023

Pihak Kedua,

Agus Darmawan, S.Pd, M.Si

Pihak Pertama,

Marcelly, M.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jalan Poros Ujoh Bilang – Long Melaham RT.XV Kecamatan Long Bagun



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ding Kueng, S.Hut**
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Agus Darmawan, S.Pd, M.Si.**
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
selanjutnya disebut **pihak kedua**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ujoh Bilang, 16 Januari 202

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Agus Darmawan, S.Pd, M.Si

Ding Kueng, S.Hut



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jalan Poros Ujoh Bilang – Long Melaham RT.XV Kecamatan Long Bagun



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target
1.	Program Penanggulangan Bencana (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	Persentase Kampung Tangguh Bencana	4%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penanggulangan Bencana (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	Rp. 1,232,089,300	APBD
JUMLAH		Rp. 1,232,089,300	

Ujoh Bilang, 16 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Agus Darmawan, S.Pd, M.Si

Ding Kueng, S.Hut



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Papilus Panyu, SKM**
Jabatan : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Agus Darmawan, S.Pd, M.Si.**
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
selanjutnya disebut **pihak kedua**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ujoh Bilang, 19 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Agus Darmawan, S.Pd, M.Si

Papilus Panyu, SKM



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jalan Poros Ujoh Bilang – Long Melaham RT.XV Kecamatan Long Bagun



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target
1.	Program Penanggulangan Bencana (Bidang Kedarruratan dan Logistik)	Cakupan Penanggulangan Bencana	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penanggulangan Bencana (Bidang Kedarruratan dan Logistik)	Rp. 1,688,438,000	APBD
JUMLAH		Rp. 1,688,438,000	

Ujoh Bilang, 19 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Agus Darmawan, S.Pd, M.Si

Papilus Panyu, SKM



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jalan Poros Ujoh Bilang – Long Melaham RT.XV Kecamatan Long Bagun



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Gazali Rahman, S.Sos**
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Agus Darmawan, S.Pd, M.Si.**
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
selanjutnya disebut **pihak kedua**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ujoh Bilang, 16 Januari 2023

Pihak Kedua,

Agus Darmawan, S.Pd, M.Si

Pihak Pertama,

Gazali Rahman, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jalan Poros Ujoh Bilang – Long Melaham RT.XV Kecamatan Long Bagun



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target
1.	Program Penanggulangan Bencana (Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi)	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penanggulangan Bencana (Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi)	Rp. 184,935,000	APBD
JUMLAH		Rp. 184,935,000	

Ujoh Bilang, 16 Januari 2023

Pihak Kedua,

Agus Darmawan, S.Pd, M.Si

Pihak Pertama,

Gazali Rahman, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jalan Poros Ujoh Bilang – Long Melaham RT.XV Kecamatan Long Bagun



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Marcus Ingan. B, S.Sos**
Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Marcelly, M.Pd**
Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
selanjutnya disebut **pihak kedua**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ujoh Bilang, 16 Januari 2023

Pihak Kedua,

Marcelly, M.Pd

Pihak Pertama,

Marcus Ingan. B, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jalan Poros Ujoh Bilang – Long Melaham RT.XV Kecamatan Long Bagun



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah	100%
2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	100%
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	100%
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	100%

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.663.214.200	APBD
2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 250.000.000	APBD
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.293.600.000	APBD
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.393.316.000	APBD
JUMLAH		Rp. 4,600,130,200	

Ujoh Bilang, 16 Januari 2023

Pihak Kedua,

Marcellly, M.Pd

Pihak Pertama,

Marcus Ingan. B, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

INSPEKTORAT

Jln. Gunung Belareq Gang Dunhill RT VII Kode Pos 75767
UJOH BILANG

Nomor : 700/04/Inspektorat/ELKJiP.2022/IX/2023 Ujoh Bilang, 15 September 2023
Lampiran : Berita Acara Kesepakatan
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja BPBD Kabupaten Mahakam Ulu
Tahun Anggaran 2022

Kepada Yth.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Mahakam Ulu

Di –

Ujoh Bilang

1. Pendahuluan

- 1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Permenpan No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur Daerah Nomor: 090/58/INSPEKTORAT/VIII/2023 tanggal 5 Juni 2023, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan 15 September 2023.
- 2) Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauhmana akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented goverment*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk:
 - a. Memperoleh informasi tentang Implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat Implementasi SAKIP SKPD;
 - c. Menilai tingkat Akuntabilitas Kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi AKIP;

e. Memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya agar terlaksananya percepatan tindak lanjut.

3) Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, dan penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada Perangkat Daerah.

4) Pelaksanaan Evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak lanjut Hasil Evaluasi tahun sebelumnya

Tindak lanjut atas evaluasi kinerja tahun sebelumnya sebagian telah ditindaklanjuti, namun masih terdapat kekurangan yang belum ditindaklanjuti diantaranya:

- 1) Hasil revidi berjenjang, mekanisme pengumpulan data kinerja, hasil evaluasi internal dan rencana aksi serta pementauan berkelanjutan masih belum terdokumentasi dengan baik;
- 2) Belum terdapat sistem informasi berbasis teknologi dalam melakukan pengukuran kinerja.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi dan monitoring Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 memperoleh nilai sebesar **51,60 (Lima Puluh Satu Koma Enam Puluh)** dengan predikat penilaian **CC (Cukup)** sebagaimana tabel berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2022	Predikat Penilaian
1	Perencanaan Kinerja	30	18,90	
2	Pengukuran Kinerja	30	12,60	
3	Pelaporan Kinerja	15	8,85	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	11,25	
	Nilai Hasil Evaluasi	100	51,60	
	Kategori Penilaian		CC	Cukup/Memadai

Dengan Predikat **CC (Cukup)** terdapat gambaran bahwa sistem dan tatanan dalam AKIP belum terimplementasi, sehingga sistem manajemen kinerja masih perlu banyak perbaikan mendasar di level organisasi perangkat daerah.

Lebih lanjut Berita Acara kesepakatan dapat dilihat pada lampiran 1.

Hasil evaluasi tahun 2022 "**tidak dapat diperbandingkan**" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 sebagai berikut:

1) Perencanaan Kerja

Perencanaan kinerja dengan bobot penilaian sebesar 30,00 memperoleh nilai atau skor sebesar 18,90 dengan rincian sebagai berikut:

a. Dokumen Renstra memperoleh nilai 6 dari nilai maksimal 6,00, yang terdiri dari:

a) Dokumen Perencanaan Kinerja 6,00 dari nilai maksimal 6,00, hal ini tergambar dari:

- (1) Telah ada Pedoman Teknis Perencanaan Kerja;
- (2) Telah ada Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Pemerintah Daerah;

- (3) Telah ada Dokumen Perencanaan Jangka Menengah berupa Renstra;
 - (4) Telah ada Dokumen Perencanaan Jangka Pendek seperti Renja dan PK, serta didukung dengan perencanaan anggaran seperti Dokumen Perencanaan Anggaran.
- b) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*), memperoleh nilai 5,4 dari nilai maksimal 9,00, hal ini tergambar dari:
- (1) Seluruh Dokumen Pencanaan sudah diformalkan;
 - (2) BPBD memiliki SK IKU yang memenuhi indikator SMART;
 - (3) Telah dibuat dokumen Perjanjian Kinerja seluruh Pegawai BPBD dari Bidang hingga Sub Bidang yang mendukung perencanaan kinerja dan sasaran strategis OPD;
 - (4) Belum terdapat website untuk mendukung publikasi dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja;
 - (5) Keselarasan Renstra, RKT dan PK Perlu dievaluasi terkait keselarasan dokumen tersebut;
 - (6) Dokumen Perencanaan Kinerja belum menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*).
- c) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan memperoleh nilai 7,5 dari nilai maksimal 15,00, hal ini tergambar dari:
- (1) Telah dibuat dokumen Rencana Aksi, namun pemantauan secara berkala belum dilakukan;
 - (2) Belum terdapat dokumen pemantauan berkala yang digunakan untuk perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja;
 - (3) Rencana Aksi belum dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan;
 - (4) Target belum ditetapkan dengan baik sehingga belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan.

2) Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja memperoleh nilai 12,60 dari nilai maksimal 30,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan, memperoleh nilai 3,6 dari nilai maksimal 6,00 namun masih terdapat kekurangan yaitu:
 - (1) Mekanisme pengumpulan data kinerja belum ada, sehingga perlu ada dokumen yang mengatur seperti SOP tentang penyusunan dan pengukuran kinerja serta pengumpulan dana kinerja;
 - (2) Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan di *website* resmi BPBD Kabupaten Mahakam Ulu.
- b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, memperoleh nilai 4,5 dari nilai maksimal 9,00 hal ini tergambar dari:
 - (1) Belum terdapat data pendukung yang menyatakan pimpinan terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja, contohnya Undangan Rapat dan Notulen Rapat Evaluasi;
 - (2) Pengumpulan data kinerja belum dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester);
 - (3) Pengukuran data kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi;
 - (4) Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi.
- c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, memperoleh nilai 4,5 dari nilai maksimal 15,00, hal ini tergambar dari:
 - (1) Indikator Kinerja Utama dalam SK IKU belum direviu secara berkala, terkait Capaian Target dan penetapan Indikator Kinerja;
 - (2) Belum terdapat *system reward* dan *punishment* dalam pengukuran kinerja pegawai;
 - (3) Target Kinerja eselon III dan eselon IV belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya;
 - (4) Belum terdapat penyajian Efisiensi Penggunaan Anggaran.

3) Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja memperoleh nilai 8,85 dari nilai maksimal 15,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja Kriteria memperoleh nilai 2,4 dari nilai maksimal 3,00, hal ini tergambar dari:
 - (1) Laporan Kinerja belum di upload ke dalam *website* resmi BPBD Kabupaten Mahakam Ulu;
 - (2) Laporan Kinerja belum menyajikan informasi mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama;
 - (3) Penyerahan Laporan Kinerja kepada bagian organisasi belum menggunakan tanda terima penyerahan berkas.

- b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standard menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya memperoleh nilai 2,70 dari nilai maksimal 4,50, hal ini tergambar dari:
 - (1) Laporan Kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya keuangan;
 - (2) Laporan Kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

- c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar Informasi Kinerja memperoleh nilai 3,75 dari nilai maksimal 7,50, hal ini tergambar dari:
 - (1) Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan;
 - (2) Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
 - (3) Informasi yang disajikan belum digunakan untuk penilaian perbaikan kinerja.

4) Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot penilaian memperoleh nilai 11,25 dari nilai maksimal 25,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan memperoleh nilai 3,00 dari nilai maksimal 5,00, hal ini disebabkan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan seluruh bidang/sub bidang/staf;
- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya memadai, memperoleh nilai 4,50 dari nilai maksimal 7,50, hal ini tergambar dari:
 - (1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi e-sakip);
 - (2) Belum terdapat dokumen pemantauan rencana aksi untuk menilai keberhasilan capaian sasaran/program.
- c. Impementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja memperoleh nilai 3,75 dari nilai maksimal 12,50, hal ini tergambar dari:
 - (1) Belum terdapat dokumen tindak lanjut atas hasil rekomendasi LAKIP;
 - (2) Belum seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti;
 - (3) Pemantauan Rencana Aksi belum memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan;
 - (4) Hasil dan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

4. Rekomendasi

Terhadap kondisi di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu agar melakukan perbaikan dan menjadi perhatian sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Kinerja mendapat nilai 18,90 dari nilai maksimal 30,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dokumen Perencanaan Kinerja 6 dari nilai maksimal 6,00 sehingga perlu komitmen untuk mempertahankan skor yang sudah diraih;

b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*), memperoleh nilai 5,40 dari nilai maksimal 9,00.

(1) Perlu adanya website untuk mendukung publikasi dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja;

(2) Membuat dokumen Perjanjian Kinerja seluruh Pegawai BPBD dari Bidang hingga Sub Bidang yang mendukung perencanaan kinerja dan sasaran strategis OPD;

(3) Perlu adanya evaluasi dokumen Renstra, RKT dan PK sehingga bisa dilakukan uji keselarasan;

(4) Perlu adanya dokumen Perencanaan Kinerja yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*);

c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan memperoleh nilai 7,50 dari nilai maksimal 15,00, upaya perbaikan yang bisa dilakukan diantaranya:

(1) Target kinerja yang diperjanjikan, agar digunakan untuk mengukur keberhasilan;

(2) Memonitor/memantau pencapaian Rencana Aksi atas kinerja secara berkala dan disajikan dalam laporan hasil monitoring rencana aksi terdokumentasi;

(3) Rencana Aksi yang sudah disusun dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

2) Pengukuran Kinerja mendapat nilai 12,60 dari nilai maksimal 30,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pengukuran memperoleh nilai 6,00 dari nilai maksimal 6,00.

(1) Membuat SOP atau surat edaran tentang mekanisme pengumpulan data kinerja;

(2) Mempublikasikan Indikator Kinerja Utama di *website* resmi BPBD Kabupaten Mahakam ulu.

- b. Kualitas Pengukuran memperoleh nilai 4,50 dari nilai maksimal 9,00.
- (1) Pengumpulan data kinerja perlu menggunakan teknologi informasi (aplikasi);
 - (2) Pengukuran capaian kinerja perlu menggunakan teknologi (aplikasi);
 - (3) Perlu adanya pendokumentasian terkait pemantauan kinerja yang dilakukan pimpinan OPD;
 - (4) Membuat suatu sistem informasi pengumpulan data kinerja yang berbasis teknologi di unit kerja organisasi agar tim penyusun LKjIP tidak kesulitan dan lebih cepat dalam mendapatkan data kinerja.
- c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien memperoleh nilai 4,50 dari nilai maksimal 15,00.
- (1) Menselaraskan jumlah IKU pada SK IKU dan Perjanjian Kinerja dengan di LKjIP sehingga ada konsistensi IKU yang digunakan;
 - (2) Menselaraskan sasaran IKU pada SK IKU dengan di Perjanjian Kinerja dan LKjIP sehingga ada konsistensi sasaran IKU yang digunakan;
 - (3) Memonitor/memantau target kinerja eselon III dan IV dalam pencapaiannya dan disajikan dalam laporan hasil monitoring/terdokumentasi;
- 3) Pelaporan Kinerja mendapat nilai 8,85 dari nilai maksimal 15,00, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pemenuhan Laporan memperoleh nilai 2,40 dari nilai maksimal 3,00.
- (1) Mempublikasikan Laporan Kinerja di website resmi BPBD Kabupaten Mahakam Ulu;
 - (2) Laporan Kinerja agar menyajikan informasi mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama;
 - (3) Dokumen SAKIP disampaikan tepat waktu dan dibuktikan dengan tanda terima penyerahan dokumen.
- b. Penyajian Informasi Kinerja memperoleh nilai 2,70 dari nilai maksimal 4,50.
- (1) Laporan Kinerja agar menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya keuangan;

- (2) Laporan Kinerja agar menyajikan informasi tentang analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- (3) Pemanfaatan Informasi Kinerja memperoleh nilai 3,75 dari nilai maksimal 7,50.
- (1) Informasi yang disajikan agar digunakan dalam perbaikan perencanaan;
 - (2) Informasi yang disajikan agar digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
 - (3) Informasi yang disajikan agar digunakan untuk penilaian perbaikan kinerja.
- 4) Evaluasi Kinerja mendapat nilai 11,25 dari nilai maksimal 25,00, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pemenuhan Evaluasi Internal memperoleh nilai 2,50 dari nilai maksimal 5,00, dengan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kinerja dan didukung dengan bukti hasil evaluasi.
 - b. Kualitas evaluasi internal memperoleh nilai 4,5 dari nilai maksimal 7,50.
 - (1) Memonitor/memantau Akuntabilitas Kinerja dalam rangka mengendalikan kinerja dan memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan dan didokumentasikan;
 - (2) Melaksanakan evaluasi kinerja internal seperti rapat internal terkait evaluasi kegiatan dengan menggunakan teknologi informasi (aplikasi).
 - c. Pemanfaatan Evaluasi internal memperoleh nilai 3,75 dari nilai maksimal 12,50, dengan melakukan evaluasi kinerja kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Pimpinan beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Inspektur,
Budi Gunarjo Ompusunggu, SE, Ak, MM, CA, AAP, CFA, CGCAE
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19650722 198703 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang;**
2. Wakil Bupati Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang;**
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang;**
4. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang;**
5. Arsip.

**RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
HASIL EVALUASI SAKIP INTERNAL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU**

Rekomendasi	Action Plan	Target Penyelesaian												Status Penyelesaian	Link Data Dukung		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
A. PERENCANAAN KINERJA																	
1	Perlu adanya website untuk mendukung publikasi dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja;	1	Telah ada website													Selesai	http://bpbdmahulu.id/
2	Membuat dokumen Perjanjian Kinerja seluruh Pegawai BPBD dari Bidang hingga Sub Bidang yang mendukung perencanaan kinerja dan sasaran strategis OPD sasaran strategis OPD;	1	Telah ada Perjanjian Kinerja seluruh Pegawai BPBD													Selesai	https://drive.google.com/file/d/1nXZfmdXKcA5FCTC0gebuRtiz-CDTXXmd/view?usp=sharing
3	Perlu adanya evaluasi dokumen Renstra, RKT dan PK sehingga bisa dilakukan uji keselarasan	1	Telah melakukan evaluasi dokumen Renstra, RKT dan PK													Selesai	https://drive.google.com/file/d/116rIHjzXTgELr5mhpZZBL8vQxFZYsIUf/view?usp=sharing
4	Perlu adanya dokumen Perencanaan Kinerja yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading);	1	Telah ada dokumen Perencanaan Kinerja													Selesai	https://drive.google.com/file/d/1B9qiDKiKN-mMarUjkdHUQ_vUP4WR0Tt/view?usp=sharing
5	Target kinerja yang diperjanjikan, agar digunakan untuk mengukur keberhasilan	1	Target kinerja yang diperjanjikan, di jadikan sebagai alat ukur keberhasilan													Selesai	https://drive.google.com/file/d/116rIHjzXTgELr5mhpZZBL8vQxFZYsIUf/view?usp=sharing
6	Memonitor/memantau pencapaian Rencana Aksi atas kinerja secara berkala dan disajikan dalam laporan hasil monitoring rencana aksi terdokumentasi;	1	Dokumentasi laporan hasil monitoring rencana aksi													Selesai	https://drive.google.com/file/d/116rIHjzXTgELr5mhpZZBL8vQxFZYsIUf/view?usp=sharing
7	Rencana Aksi yang sudah disusun dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan.	1	Rencana Aksi yang disusun telah dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan													Selesai	https://drive.google.com/file/d/1tAIRI4yczcl2HeWcYKQv6a_lwmJJ9QxS/view?usp=sharing

Rekomendasi	Action Plan	Target Penyelesaian												Status Penyelesaian	Link Data Dukung		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
B. PENGUKURAN KINERJA																	
1	Membuat SOP atau surat edaran tentang mekanisme pengumpulan data kinerja;	1	Telah Membuat SOP													Selesai	https://drive.google.com/file/d/1-tEzJyPEOMs-VjkH6i7kp-IWV5K5CY0/view?usp=sh
2	Mempublikasikan Indikator Kinerja Utama di website resmi BPBD Kabupaten Mahakam ulu	1	Telah Mempublikasikan Indikator Kinerja Utama pada website BPBD													Selesai	http://bpbdmahulu.id/
3	Pengumpulan data kinerja perlu menggunakan teknologi informasi (aplikasi);	1	Pengumpulan data kinerja pada BPBD menggunakan teknologi informasi (aplikasi) Whatsapp Group dan Pelaporan SPM Melalui Google Doc													Selesai	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nkz8yTg1U4Nv0rYz8tBTbC9cBcXiC3vK_9Hm9moTz7U/edit?usp=sharing
4	Pengukuran capaian kinerja perlu menggunakan teknologi (aplikasi);	1	Mengupload Capaian Kinerja pada Aplikasi E-Kinerja secara berkala setiap bulan													Selesai	https://drive.google.com/file/d/1vGqzGLX_hFvoC5HDKmvAC1sNIBgaQh5G/view?usp=sharing
5	Perlu adanya pendokumentasian terkait pemantauan kinerja yang dilakukan pimpinan OPD	1	Dokumentasi/Notulen Rapat													Selesai	https://drive.google.com/file/d/116rIHjzXTgELr5mhPZZBL8vQxFZYsIUf/view?usp=sharing
6	Membuat suatu sistem informasi pengumpulan data kinerja yang berbasis teknologi di unit kerja organisasi agar tim penyusun LKjIP tidak kesulitan dan lebih cepat dalam mendapatkan data kinerja kesulitan dan lebih cepat dalam mendapatkan data kinerja.	1	Sistem informasi pengumpulan data kinerja yang berbasis teknologi di muat pada website BPBD untuk mempermudah memperoleh data dan informasi													Selesai	http://bpbdmahulu.id/
7	Menselaraskan jumlah IKU pada SK IKU dan Perjanjian Kinerja dengan di LKjIP sehingga ada konsistensi IKU yang digunakan	1	Telah Menselaraskan jumlah IKU pada SK IKU dan Perjanjian Kinerja dengan di LKjIP													Selesai	https://drive.google.com/file/d/1BxIX1M0zTQtsmu8q_gmT7pgRTsnSUEub/view?usp=sharing
8	Menselaraskan sasaran IKU pada SK IKU dengan di Perjanjian Kinerja dan LKjIP sehingga ada konsistensi sasaran IKU yang digunakan	1	Telah Menselaraskan jumlah IKU pada SK IKU dan Perjanjian Kinerja dengan di LKjIP													Selesai	https://drive.google.com/file/d/1BxIX1M0zTQtsmu8q_gmT7pgRTsnSUEub/view?usp=sharing
9	Memonitor/memantau target kinerja eselon III dan IV dalam pencapaiannya dan disajikan dalam laporan hasil monitoring/terdokumentasi;	1	Dokumentasi/Notulen Rapat													Selesai	https://drive.google.com/file/d/116rIHjzXTgELr5mhPZZBL8vQxFZYsIUf/view?usp=sharing

Rekomendasi	Action Plan	Target Penyelesaian												Status Penyelesaian	Link Data Dukung		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
C. PELAPORAN KINERJA																	
1	Mempublikasikan Laporan Kinerja di website resmi BPBD Kabupaten Mahakam Ulu;	1	Mempublikasikan Laporan Kinerja di website resmi BPBD													Selesai	http://bpbdmahulu.id/
2	Laporan Kinerja agar menyajikan informasi mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama;	1	Indikator Kinerja Utama													Selesai	https://drive.google.com/file/d/1ggR4JqG0t1VF10n-o1knm21iuQPKAf/view?u
3	Dokumen SAKIP disampaikan tepat waktu dan dibuktikan dengan tanda terima penyerahan dokumen.	1	Dokumen SAKIP disampaikan tepat waktu													Selesai	https://drive.google.com/file/d/1DLPJG6SL2c3Wk7ByHVf6WqXFL5Xza7Y6/view?usp=sharing
4	Laporan Kinerja agar menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya keuangan;	1	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya keuangan													Selesai	https://drive.google.com/file/d/1BxIX1M0zTQtsmu8q_gmT7pgRTsnSUEub/view?usp=sharing
5	Laporan Kinerja agar menyajikan informasi tentang analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan alternative solusi yang telah dilakukan;	1	Laporan Kinerja disajikan dalam LKJIIP													Selesai	https://drive.google.com/file/d/1BxIX1M0zTQtsmu8q_gmT7pgRTsnSUEub/view?usp=sharing
6	Informasi yang disajikan agar digunakan dalam perbaikan perencanaan;	1	Informasi yang disajikan digunakan dalam perbaikan perencanaan													Selesai	https://drive.google.com/file/d/1BxIX1M0zTQtsmu8q_gmT7pgRTsnSUEub/view?usp=sharing
7	Informasi yang disajikan agar digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;	1	Informasi yang disajikan digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi													Selesai	https://drive.google.com/file/d/1BxIX1M0zTQtsmu8q_gmT7pgRTsnSUEub/view?usp=sharing
8	Informasi yang disajikan agar digunakan untuk penilaian perbaikan kinerja.	1	Informasi yang disajikan digunakan untuk penilaian perbaikan kinerja													Selesai	https://drive.google.com/file/d/1BxIX1M0zTQtsmu8q_gmT7pgRTsnSUEub/view?usp=sharing

Rekomendasi	Action Plan	Target Penyelesaian												Status Penyelesaian	Link Data Dukung	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL																
1	Memonitor/memantau Akuntabilitas Kinerja dalam rangka mengendalikan kinerja dan memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan dan didokumentasikan;	1													Selesai	https://drive.google.com/file/d/1v-MmixB2tLR1R/view?usp=sharing
2	Melaksanakan evaluasi kinerja internal seperti rapat internal terkait evaluasi kegiatan dengan menggunakan teknologi informasi (aplikasi)	1												Selesai	https://drive.google.com/file/d/19-b0zsF7yQOVQxIJNh5M2mbNNWJiiZr/view?usp=sharing	



Kepala Pelaksana BPBD,

Agus Darmawan, S.Pd., M.Si.
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19790816 200312 1 008



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021-2982 7793, Faksimile: 021-2128 1200

Situs: <http://www.bnpb.go.id>

Nomor : B-20.23/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penyampaian Hasil IKD 2023 dan IRBI 2023

15 Januari 2024

Yth. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
di tempat

BNPB telah menerima nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 2023 di tingkat kabupaten/kota melalui media <https://inarisk.bnpb.go.id/admin>. Nilai IKD yang dikumpulkan telah dilakukan verifikasi bertahap, dimulai oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur dan dilanjutkan dengan verifikasi oleh BNPB. Berdasarkan hal-hal tersebut, bersama ini kami sampaikan beberapa hal berikut:

1. BNPB memberikan apresiasi kepada Provinsi Kalimantan Timur yang telah konsisten mendorong kabupaten/kota untuk melakukan penilaian IKD setiap tahun;
2. BNPB juga memberikan apresiasi terhadap BPBD Kabupaten/Kota yang telah melakukan penilaian IKD pada 2023, sebagaimana terlampir;
3. BNPB telah menyampaikan surat dengan nomor B-403.23/BNPB/D-I/SS.01.03/12/2023 dan telah memberikan kesempatan Kabupaten/Kota untuk memperpanjang waktu pengumpulan dan pemenuhan bukti verifikasi IKD 2023 hingga 21 Desember 2023;
4. Setelah perpanjangan waktu, maka didapatkan jumlah Kabupaten/Kota yang mengumpulkan IKD di Provinsi Kalimantan Timur sejumlah 10 dari 10 Kabupaten/kota;
5. Setelah melalui beberapa proses tersebut, maka nilai IKD 2023 rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur adalah 0,45 dan nilai IRB 2023 untuk Provinsi Kalimantan Timur adalah 144,43.
6. BNPB menghimbau Provinsi Kalimantan Timur melalui BPBD Provinsi Kalimantan Timur untuk mengkoordinasikan pengumpulan IKD Kabupaten/Kota di tahun 2024;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Deputi Bidang Sistem dan Strategi

Raditya Jati

Tembusan :

1. Kepala BNPB;
2. Sekretaris Utama;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Timur.

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Lampiran
Nomor Surat : B-20.23/BNPB/D-I/SS.01.03/12/2023
Tanggal : 15 Januari 2023

**Nilai IKD 2023 dan IRB 2023 Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Timur**

KABUPATEN/KOTA	IKD 2023	IRB 2023
Paser	0,35	191.78
Kutai Barat	0,36	149.15
Kutai Kartanegara	0,52	114.30
Kutai Timur	0,36	185.17
Berau	0,47	173.74
Penajam Paser Utara	0,53	129.44
Mahakam Ulu	0,31	156.40
Kota Balikpapan	0,60	118.21
Kota Samarinda	0,58	98.29
Kota Bontang	0,46	127.85

*) Tautan untuk mengunduh file excel IKD Kabupaten/Kota Final 2023 : https://bit.ly/IKD_Kalimantan_Timur_2023_Final



Deputi Bidang Sistem dan Strategi

Raditya Jati

**PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LKJIP
PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN 2024**

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



KABUPATEN MAHAKAM ULU

BERITA ACARA
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LKJIP
KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Dengan ini kami laporkan bahwa pada hari Rabu Tanggal 21 Bulan Maret 2024 telah dilaksanakan Pendampingan Penyusunan LkjIP Tahun 2024 di Kantor Bapelitbangda Berikut adalah berita acara pendampingan sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

NO.	Hasil Review Fasilitator	Rekomendasi
1.	Daftar isi belum sinkron dengan halamannya	Dibuat sinkronisasi secara otomatis melalui software word
2.	LKj telah menyajikan informasi target kinerja	
3.	Hasil analisis tabelnya sudah baik serta sudah menyajikan analisis keberhasilan/kegagalan dan telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	
4.	Belum ada lampiran	Masukkan lampiran berupa bentuk foto scan atau screen shoot

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan sebaik-baiknya dan dapat dipertanggungjawabkan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Peserta

**Pendampingan Penyusunan LKjIP
Kabupaten Mahakam Ulu
Badan Penanggulangan Bencana Daerah**



Batara Lawalata Budaiska, S.STP
NIP. 19951205 201708 1 002

Fasilitator

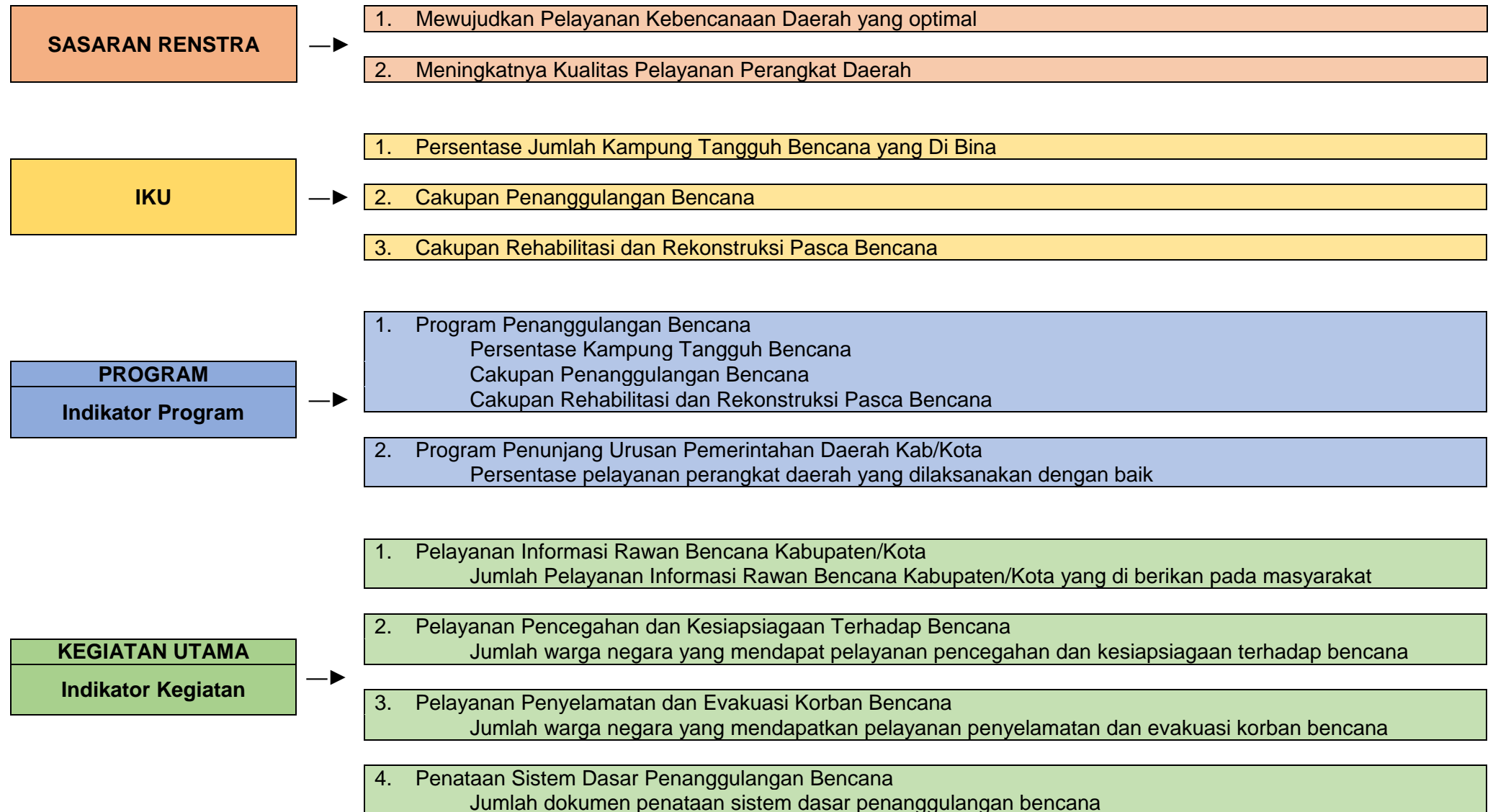


Tiara Rahany Aulia



CASCADING KINERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU



KEGIATAN PENUNJANG Indikator Kegiatan →	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Teradministrasinya keuangan perangkat daerah dengan baik
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Teradministrasinya kepegawaian perangkat daerah dengan baik
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang urusan perangkat daerah
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah

**SUB KEGIATAN UTAMA – INDIKATOR SUB KEGIATAN
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**

1.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	—▶	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana
2.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	—▶	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya
3.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	—▶	Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
4.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	—▶	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk Warga Negara maupun Aparatur di Kawasan Rawan Bencana
5.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	—▶	Tersedianya Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
6.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	—▶	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
7.	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	—▶	Tersedianya Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana

8.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	—▶	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Kawasan-Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
9.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	—▶	Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Provinsi dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana
10.	Penyusunan Rencana Kontinjensi	—▶	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah
11.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	—▶	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana prioritas di Daerah
12.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	—▶	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)
13.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	—▶	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
14.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	—▶	Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
15.	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	—▶	Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas
16.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	—▶	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam
17.	Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	—▶	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman
18.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	—▶	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
19.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	—▶	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi
20.	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	—▶	Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam
21.	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	—▶	Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah
22.	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	—▶	Tersedianya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah
23.	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	—▶	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
24.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	—▶	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan
25.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	—▶	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
26.	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	—▶	Tersedianya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)

**SUB KEGIATAN PENDUKUNG – INDIKATOR SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**

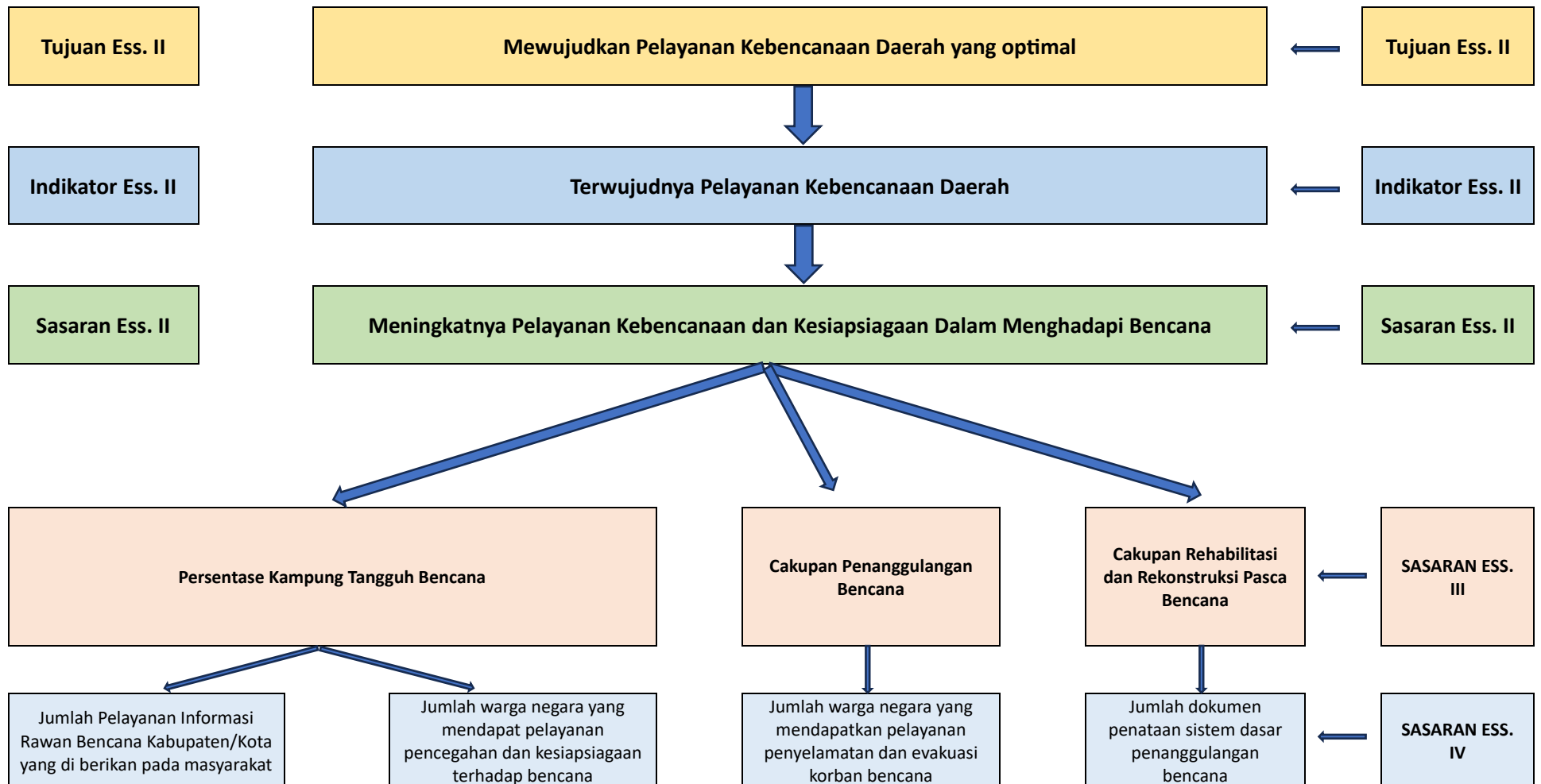
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	—▶	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	—▶	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	—▶	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	—▶	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	—▶	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	—▶	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	—▶	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	—▶	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN
9.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	—▶	Terbayarnya ASN yang terkait tugas administrasi tambahan
10.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	—▶	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
11.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	—▶	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
12.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	—▶	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
13.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	—▶	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
14.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	—▶	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
15.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	—▶	Tersedianya pakaian dinas pegawai
16.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	—▶	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
17.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	—▶	Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan
18.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	—▶	Terimplementasinya bimbingan teknis peraturan perundang-undangan
19.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	—▶	Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik serta jasa instalasi listrik
20.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	—▶	Tersedianya alat tulis kantor serta peralatan dan perlengkapan kantor
21.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	—▶	Tersedianya peralatan rumah tangga
22.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	—▶	Tersedianya bahan logistik kantor
23.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	—▶	Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan
24.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	—▶	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
25.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	—▶	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah

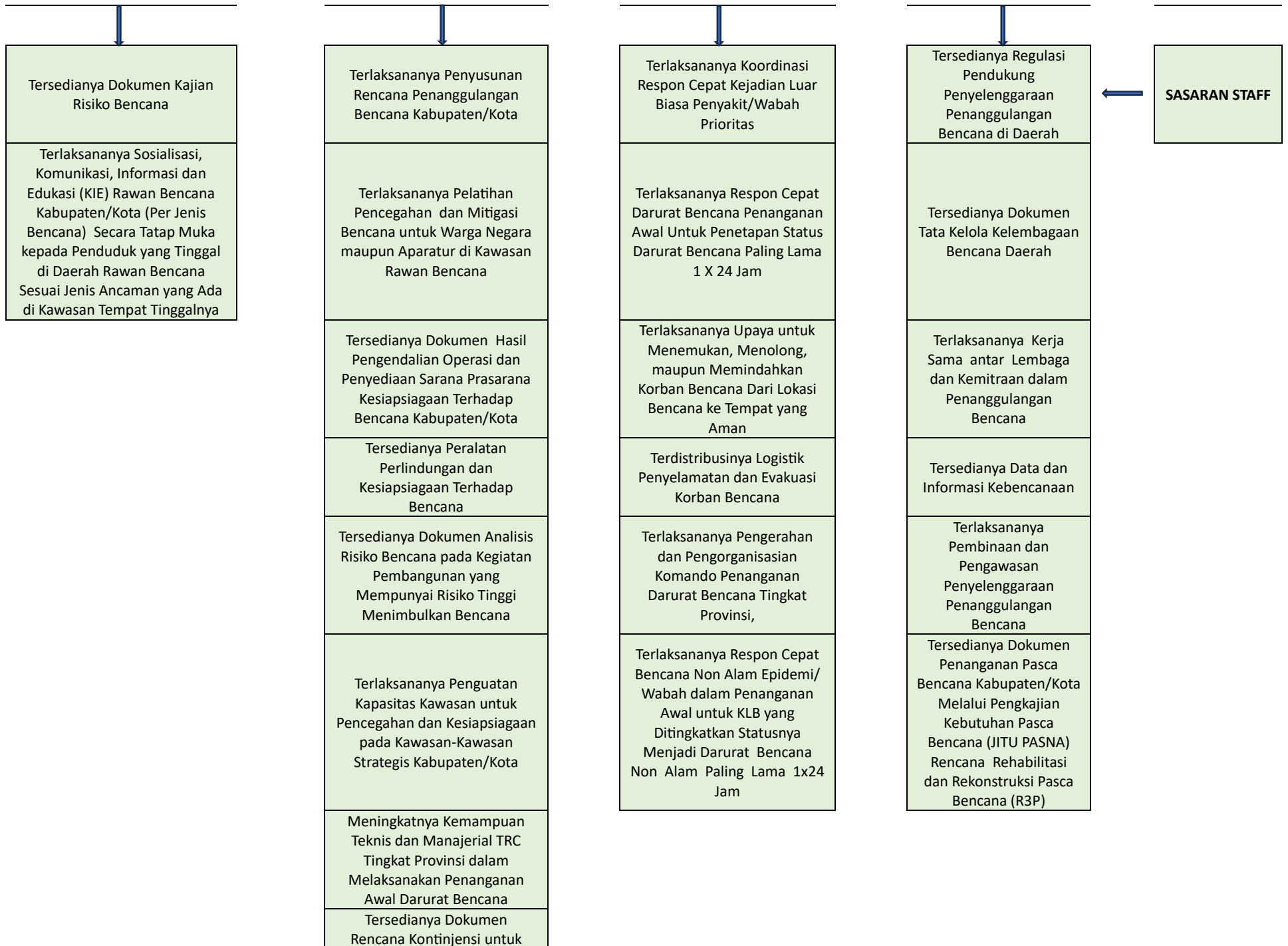
26.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	—▶	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
27.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	—▶	Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
28.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	—▶	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
29.	Pengadaan Mebel	—▶	Tersedianya mebel untuk kantor
30.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	—▶	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
31.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	—▶	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
32.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	—▶	Tersedianya materai dan jasa pengiriman
33.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	—▶	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
34.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	—▶	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
35.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	—▶	Terbayarnya gaji/honorarium tenaga kontrak/PTT
36.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	—▶	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
37.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	—▶	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
38.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	—▶	Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
39.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	—▶	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor



POHON KINERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU





Setiap Bencana Prioritas di Daerah
Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana prioritas di Daerah
Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

Data Isian IKU BPBD

Indikator Kinerja 1: Persentase Kampung Tangguh Bencana

Tabel 1. Perbandingan antara Target, Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2022 dan 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Persentase Kampung Tangguh Bencana	0%	0%	100%	4%	0%	0%

Tabel 2. Perbandingan Target Kinerja berdasar Dokumen Rencana Strategis BPBD 2022 - 2026

No	Indikator	TAHUN				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Kampung Tangguh Bencana	0%	4%	12%	20%	30%

Tabel 3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kinerja
Persentase Kampung Tangguh Bencana	1. Belum ada nya dokumen pendukung untuk penentuan dan pembentukan Kampung Tangguh Bencana yaitu Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB)
	2. Dokumen KRB dibuat pada Anggaran Perubahan Tahun 2023
	3. Untuk Tahun 2022 BPBD Baru Terbentuk jadi belum memiliki anggaran untuk pembentukan Kampung Tanggu
	4.

Tabel 4

Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja tahun 2022 s/d 2023

No	Program/Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	629,881,260	625,815,800	99%	5,827,324,100	4,184,778,270	72%
1	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	629,881,260	625,815,800	99%	2,883,868,900	1,962,495,189	68%
1	Sub. Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				438,103,900	302,473,200	69%
2	Sub. Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	629,881,260	625,815,800	99%	200,000,000	162,234,000	81%
3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				2,245,765,000	1,497,787,989	67%
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				2,943,455,200	2,222,283,081	75%
4	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)				2,943,455,200	2,222,283,081	75%

Tabel 5**Analisis atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya tahun 2022 s/d 2023**

No	Indikator Kinerja	Tingkat Efektivitas dan Efisiensi	
		2022	2023
1	Persentase Kampung Tangguh Bencana	101%	0

Tabel 6. Perbandingan Antara Persentase Capaian Kinerja Tahun 2022 s/d 2023 dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun		Standar Nasional	
		2022	2023	2022	2023
1	Persentase Kampung Tangguh Bencana				

Data Isian IKU BPBD
Indikator Kinerja 2: CAKUPAN PENANGGULANGAN BENCANA

Tabel 1. Perbandingan antara Target, Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2022 dan 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	CAKUPAN PENANGGULANGAN BENCANA	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2. Perbandingan Target Kinerja berdasar Dokumen Rencana Strategis BPBD 2022 - 2026

No	Indikator	TAHUN				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	CAKUPAN PENANGGULANGAN BENCANA	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja
CAKUPAN PENANGGULANGAN BENCANA	1. Kerjasama tim yang saling mendukung serta peran lintas sektor dalam meningkatkan optimalitas layanan yang diberikan kepada warga masyarakat yang membutuhkan
	2. Konflik yang muncul dan berpotensi menjadi penghambat, segera diselesaikan secara internal bidang KL terlebih dahulu kemudian mencari solusi permasalahan dengan tetap melibatkan tim dan dilaporkan ke pimpinan
	3. Angka kejadian kebencanaan yang masih rendah di kabupaten Mahakam Ulu, sehingga dapat ditangani secara keseluruhan oleh kerjasama tim dan lintas sektor terkait
	4. Dukungan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui anggaran BPBD dalam meningkatkan kompetensi SDM kebencanaan khususnya bidang KL dalam melakukan penanganan di lokasi bencana



Tabel 4

Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja tahun 2022 s/d 2023

No	Program/Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PENANGGULANGAN BENCANA						
	<i>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>						
	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	897,326,000	490,115,775	55%			
	Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	458,946,700	443,339,700	97%			
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	370,790,000	336,561,000	91%			
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	45,021,600	44,157,600	98%			
2	PENANGGULANGAN BENCANA	-	-				
	<i>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>						
	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Bidang Kedaruratan dan Logistik	-	-		1,108,976,100	998,813,060	90%
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Bidang Kedaruratan dan Logistik				212,649,950	168,576,631	79%
	<i>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>						
	Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Kabupaten/Kota Bidang Kedaruratan dan Logistik				182,754,650	178,369,600	98%
	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Bidang Kedaruratan dan Logistik				1,758,550,000	293,396,000	17%
	Total	1,772,084,300	1,314,174,075	74%	3,262,930,700	1,639,155,291	50%

Tabel 5

Analisis atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya tahun 2022 s/d 2023

No	Indikator Kinerja	Tingkat Efektivitas dan Efisiensi	
		2022	2023
1	CAKUPAN PENANGGULANGAN BENCANA	1.35	1.99

Tabel 6. Perbandingan Antara Persentase Capaian Kinerja Tahun 2022 s/d 2023 dengan Standar Nasional (Jika ada)

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun		Standar Nasional	2023
		2022	2023		
1	CAKUPAN PENANGGULANGAN BENCANA				

DATA PENDUKUNG:

1 DATA KEJADIAN BENCANA TAHUN 2022

FORM 5.A.12 DAFTAR KEJADIAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

PROVINSI : Kalimantan Timur								
KABUPATEN/KOTA : Mahakam Ulu								
TAHUN ANGGARAN : 2022								
NO.	NAMA KEJADIAN BENCANA	TANGGAL KEJADIAN (DD/MM/YYYY)	WAKTU KEJADIAN (JAM:MENT)	WAKTU LAPORAN KEJADIAN DITERIMA (JAM:MENT)	LOKASI	STATUS DARURAT BENCANA		
						TIDAK DIKELUARKAN	DIKELUARKAN <24JAM	DIKELUARKAN >24 JAM
1	Kebakaran Rumah Pemukiman	4/23/2022	14.00 Wita	14.30 Wita	Mamahak Besar	√	-	-
2	Kebakaran Rumah Pemukiman	0/21/2022	14.30 Wita	13.45 Wita	Data Btang Baru Rt II	√	-	-
3	Kebakaran Rumah Pemukiman	12/11/2022	00. Wita	09.21 Wita	Data Btang Ulu Rt/Rw 003.000	√	-	-
4	Bencana BANJIR Lg.Lunuk.Lg.Apan	9-10/09/2022	14.30 Wita	08.00 Wita	Kec.Lg.Apan/Lg.Pahanga			√
5	Bencana Longsor Batu Bulan	10/26/2022	07.30 Wita	09.15 Wita	Batu Bulan Kec.Lg.Bagun	√	-	-
6	Bencana Longsor Batu Bulan	12/5/2022	10.00 Wita	07.30 Wita	Batu Bulan Kec.Lg.Bagun	√	-	-
7	Bencana Pohon Tumbang	1/1/2023	07.30 Wita	10.15 Wita	Batu Bulan Kec.Lg.Bagun	√	-	-

2 DATA KEJADIAN BENCANA TAHUN 2023

FORM 5.A.12 DAFTAR KEJADIAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR								
KABUPATEN/KOTA : MAHAKAM ULU								
TAHUN ANGGARAN : 2023								
NO.	NAMA KEJADIAN BENCANA	TANGGAL KEJADIAN (DD/MM/YYYY)	WAKTU KEJADIAN (JAM:MENT)	WAKTU LAPORAN KEJADIAN DITERIMA (JAM:MENT)	LOKASI	STATUS DARURAT BENCANA		
						TIDAK DIKELUARKAN	DIKELUARKAN <24JAM	DIKELUARKAN >24 JAM
1	KEBAKARAN MES PT SAW ABLING I	12/3/2023	22.22 WITA	08.00 WITA	SIMPANG KARANGAN 100 ABLING I	√	-	-
2	KEBAKARAN KAMP.LONG PAKAQ	31/03/2023	14.00 WITA	14.30 WITA	KAMP.LONG PAKAQ	√	-	-
3	LONGSOR BATU BULAN	12/4/2023	03.00 WITA	06.30 WITA	KAMP.UJOH BILANG	√	-	-
4	KEBAKARAN KAMP. BATU MAJANG	5/5/2023	15.30 WITA	15.30 WITA	KAMP.BATU MAJANG	√	-	-
5	LONGSOR KARANGAN 100	25/05/2023	02.00 WITA	08.00 WITA	KARANGAN 100 MAMBES	√	-	-
6	LONGSOR PEMUKIMAN PENDUDUK	28/05/2023	06.00 WITA	17.00 WITA	KAMP.LONG MELAHAM	√	-	-
8	KEBAKARAN PEMUKIMAN PENDUDUK	12/8/2023	14.00 WITA	17.00 WITA	KAMP. MAMAHAK BESAR	√	-	-
10	LONGSOR PEMUKIMAN PENDUDUK	26/08/2023	02.00 WITA	07.30 WITA	KAMP. UJOH BILANG RT XV	√	-	-
14	KEBAKARAN MES PT SAW ABLING I	13/10/2023	19.00 WITA	19.45 WITA	SIMPANG KARANGAN 100	√	-	-
15	KEBAKARAN PEMUKIMAN PENDUDUK	3/11/2023			KAMP.LONG PAKAQ	√	-	-
17	KEBAKARAN PEMUKIMAN PENDUDUK	5/12/2023			KAMP.LONG MERAH	√	-	-
18	KEBAKARAN PEMUKIMAN PENDUDUK	8/12/2023			KAMP TRI PARIQ	√	-	-
19	KEBAKARAN PEMUKIMAN PENDUDUK	15/12/2023			KAMP.LONG KERIQO	√	-	-

Data Isian IKU BPBD

Indikator Kinerja 3: CAKUPAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA

Tabel 1. Perbandingan antara Target, Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2022 dan 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	CAKUPAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	70%	100%	100%	80%	100%	100%

Tabel 2. Perbandingan Target Kinerja berdasar Dokumen Rencana Strategis BPBD 2022 - 2026

No	Indikator	TAHUN				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	CAKUPAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	70%	80%	80%	80%	100%

Tabel 3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kinerja
CAKUPAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	1. Pada tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu baru terbentuk, terkait pembuatan dokumen Jitupasna belum terakomodir
	2. Tidak ada penetapan status Tanggap Darurat Bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Bupati
	3. Tersedianya anggaran Penanganan Pasca Bencana
	4. Pada tahun 2022 dan 2023 belum terbentuknya tim Jitupasna Kabupaten

Tabel 4

Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja tahun 2022 s/d 2023

No	Program/Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%
1	Program Penanggulangan Bencana	Rp 69,873,200.00	Rp 69,833,200.00	99.94	Rp 603,185,400	Rp 504,191,604	83.59
1	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp 69,873,200.00	Rp 69,833,200.00	99.94			
1	Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	Rp 69,873,200.00	Rp 69,833,200.00	99.94			
2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				Rp 603,185,400	Rp 504,191,604	83.59
2	Sub Kegiatan Penanganan pasca bencana kabupaten/kota				Rp 603,185,400	Rp 504,191,604	83.59

Tabel 5

Analisis atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya tahun 2022 s/d 2023

No	Indikator Kinerja	Tingkat Efektivitas dan Efisiensi	
		2022	2023
1	CAKUPAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	100%	117%

Tabel 6. Perbandingan Antara Persentase Capaian Kinerja Tahun 2022 s/d 2023 dengan Standar Nasional (Jika ada)

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun		Standar Nasional	
		2022	2023	2022	2023
1	CAKUPAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA				

Data Isian IKU BPBD

Indikator Kinerja 4: PELAYANAN PERANGKAT DAERAH YANG DILAKSANAKAN DENGAN BAIK

Tabel 1. Perbandingan antara Target, Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2022 dan 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	PELAYANAN PERANGKAT DAERAH YANG DILAKSANAKAN DENGAN BAIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2. Perbandingan Target Kinerja berdasar Dokumen Rencana Strategis BPBD 2022 - 2026

No	Indikator	TAHUN				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	PELAYANAN PERANGKAT DAERAH YANG DILAKSANAKAN DENGAN BAIK	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kinerja
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH YANG DILAKSANAKAN DENGAN BAIK	1. Penggunaan Aplikasi yang membantu pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan efisien
	2. Terdapat dokumen perencanaan dan penganggaran yang baik
	3. Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan RAK masing-masing kegiatan
	4. Telah dilaksanakan Pelatihan bagi SDM Aparatur sesuai dengan Kompetensi masing-masing
	5. Terlaksananya koordinasi yang baik antara BPBD Kabupaten dan BPBD Provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan

Tabel 4

Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja tahun 2022 s/d 2023

No	Program/Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3,310,992,618	2,434,451,231	73.53%	15,479,370,584	14,204,729,457	91.77%
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah Kabupaten/Kota	101,870,400	101,023,600	99.17%	100,992,500	91,224,700	90.33%
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	46,730,700	45,884,900	98.19%	15,522,400	13,175,000	84.88%
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	14,197,900	14,197,900	100%	30,294,400	30,189,900	99.66%
3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	-	-	0%	6,364,500	3,485,000	54.76%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22,638,800	22,637,800	100%	22,208,200	22,168,200	99.82%
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18,303,000	18,303,000	100%	26,603,000	22,206,600	83.47%

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,349,876,498	1,520,215,550	64.69%	4,477,520,584	3,923,084,863	87.62%
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,173,499,498	1,343,838,550	62%	4,125,891,684	3,571,578,463	86.57%
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	129,360,000	129,360,000	100%	260,040,000	260,040,000	100.00%
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-		50,000,000	49,952,000	99.90%
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Akhir Tahun SKPD	21,966,000	21,966,000	100%	26,089,500	26,015,000	99.71%
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25,051,000	25,051,000	100%	15,499,400	15,499,400	100.00%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0%	221,392,000	213,714,672	96.53%
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan	-	-		221,392,000	213,714,672	96.53%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	480,955,720	448,722,081	93.30%	2,621,429,500	2,520,934,238	96.17%
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor	11,791,000	11,791,000	100%	12,428,000	12,428,000	100.00%
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	207,987,820	207,987,820	100%	1,238,979,200	1,146,994,020	92.58%
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28,356,300	28,356,300	100%	117,178,300	110,897,400	94.64%
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,665,600	1,665,600	100%	18,790,000	18,290,000	97.34%
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	231,155,000	198,921,361	86%	1,034,054,000	1,033,324,818	99.93%
17	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-		200,000,000	199,000,000	99.50%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	230,000,000	230,000,000	100.00%	450,000,000	450,000,000	100.00%
18	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	230,000,000	230,000,000	100%	450,000,000	450,000,000	100.00%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148,290,000	134,490,000	90.69%	1,400,160,000	1,233,916,750	88.13%
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,500,000	7,500,000	100%	15,000,000	15,000,000	100.00%
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Listrik	49,500,000	35,700,000	72%	66,000,000	65,436,750	99.15%
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91,290,000	91,290,000	100%	1,319,160,000	1,153,480,000	87.44%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0%	6,207,876,000	5,771,854,234	92.98%
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan	-	-		6,163,316,000	5,734,900,000	93.05%
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan atau Lapangan	-	-		44,560,000	36,954,234	82.93%

Tabel 5
Analisis atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya tahun 2022 s/d 2023

No	Indikator Kinerja	Tingkat Efektivitas dan Efisiensi	
		2022	2023
1	PELAYANAN PERANGKAT DAERAH YANG DILAKSANAKAN DENGAN BAIK	136%	109%

Data Isian IKU BPBD
Indikator Kinerja 5: INDEKS KETAHANAN DAERAH

Tabel 1. Perbandingan antara Target, Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2022 dan 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	INDEKS KETAHANAN DAERAH	0,21	0,21	100%	0,31	0,31	100%

Tabel 2. Perbandingan Target Kinerja berdasar Dokumen Rencana Strategis BPBD 2022 - 2026

No	Indikator	TAHUN				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	INDEKS KETAHANAN DAERAH	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kinerja
INDEKS KETAHANAN DAERAH	1. Data Dukung dalam pengisian Indikator masih belum lengkap
	2. Belum dilaksanakan FGD Penilaian IKD Kabupaten Mahakam Ulu bersama OPD terkait
	3. Belum memiliki Dokumen KRB, RPB dan Renkon
	4. Belum membentuk FPRB Kabupaten

Tabel 4

Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja tahun 2022 s/d 2023

No	Program/Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%
1	PENANGGULANGAN BENCANA	2,401,965,560	1,939,989,875	81%	7,981,278,700	4,825,120,501	60%
1	<i>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>	629,881,260	625,815,800	99%	3,096,518,850	2,131,071,820	69%
1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Bidang Kedaruratan dan Logistik				212,649,950	168,576,631	79%
2	Sub. Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				438,103,900	302,473,200	69%
3	Sub. Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	629,881,260	625,815,800	99%	200,000,000	162,234,000	81%
4	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				2,245,765,000	1,497,787,989	67%

2	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1,772,084,300	1,314,174,075	74%	1,941,304,650	471,765,600	24%
5	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	897,326,000	490,115,775	55%			
6	Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando P	458,946,700	443,339,700	97%			
7	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	370,790,000	336,561,000	91%			
8	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	45,021,600	44,157,600	98%			
9	Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Kabupaten/Kota Bidang Kedaruratan dan Logistik				182,754,650	178,369,600	98%
10	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Bidang Kedaruratan dan Logistik				1,758,550,000	293,396,000	17%
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0%	2,943,455,200	2,222,283,081	75%
11	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)				2,943,455,200	2,222,283,081	75%

Tabel 5
Analisis atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya tahun 2022 s/d 2023

No	Indikator Kinerja	Tingkat Efektivitas dan Efisiensi	
		2022	2023
1	INDEKS KETAHANAN DAERAH	124%	165%

Tabel 6. Perbandingan Antara Persentase Capaian Kinerja Tahun 2022 s/d 2023 dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun		Standar Nasional	
		2022	2023	2022	2023
1	INDEKS KETAHANAN DAERAH	0,21	0,31	0,66	0,66